



TRUK PENGANGKUT LPG TERPEROSOK DI JALAN POROS KM 19 BULUNGAN

BACA HALAMAN 2-3



LAPAS TARAKAN LAUNCHING
DAN PASARKAN PRODUK
UNGGULAN NARAPIDANA

BACA HALAMAN 16



Truk Pengangkut LPG Terperosok di Jalan Poros KM 19 Bulungan

TANJUNG SELOR - Jalan Poros dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, menuju Berau, Kaltim, dan sekitarnya mengalami longsor sejak beberapa bulan terakhir.

Titik ruas jalan yang longsor tersebut terletak di KM 19 Kabupaten Berau, Kaltim. Setelah kejadian longsor, warga sekitar bersama dengan sopir kendaraan lainnya bergotong royong untuk menimbun badan jalan dengan bebatuan, hal ini dilakukan untuk memastikan arus transportasi tidak terhenti.

Namun, kejadian nahas terjadi pada Senin (22/4/2024), ketika truk

pengangkut gas LPG terperosok di lubang jalan yang longsor. Bahkan, dari video yang tersebar luas, tampak bagian depan mobil truk tersebut terangkat.

Akibatnya, kendaraan dari Wilayah Kaltim menuju Kaltara, demikian sebaliknya, terpaksa mengantre sembari menunggu evakuasi selesai. Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Rayon VI Kaltimut, Gatot Subroto saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

"Saat ini kita tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltara, dan Pemerintah Daerah Be-

rau Kaltim untuk penanganan lebih lanjut. Saat ini mobil masih tertahan di lokasi," kata Gatot, sapaan akrabnya.

Pasalnya, Pemda Berau Kaltim akan menerjunkan alat berat untuk mengevakuasi truk tersebut. Pihaknya terus berusaha dengan melakukan beragam cara agar alur distribusi LPG tidak terhambat.

"Kita siapkan Jobber dan SPBE yang akan buka hingga malam hari," ujarnya.

Hal ini dilakukan sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. (TIN)



Mobil Truk Muatan LPG Sudah Dievakuasi, Arus Lalulintas Kembali Normal

TANJUNGSEROR - Sehubungan kejadian terperosoknya mobil angkut LPG di Jalan Poros Berau-Bulungan, Pertamina mencari alternatif penyaluran ke wilayah Bulungan.

Hal ini disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, dalam keterangannya pada Senin (22/4/2024).

"Truk LPG tersebut sedang membawa tabung kosong, saat ini sedang menunggu alat berat untuk mengevakuasi," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, penyaluran BBM dan LPG akan sedikit terhambat sampai perbaikan jalan selesai. Saat ini sebanyak 100 Kiloliter (KL) BBM dan 9 Metric Ton (MT) LPG disalurkan setiap harinya ke wilayah Kabupaten Bulungan dari Berau.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui tim di wilayah Kaltara, terus berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait penyaluran energi ke wilayah Bulungan.

"Kami mencoba mencarikan alternatif suplai BBM dan LPG karena memang tidak mungkin dilakukan penyaluran ke Bulungan dari Berau saat ini. Alternatif penyaluran tersebut salah satunya berasal dari Fuel Terminal Tarakan," tukasnya.

Namun tentu waktu penyalurannya akan bertambah sehingga akan terjadi keterlambatan untuk sementara waktu. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas hal tersebut.

Terkait hal di atas, Pertamina berharap perbaikan jalan akan cepat selesai sehingga distribusi BBM dan LPG ke wilayah Bulungan akan kembali normal. Masyarakat diharapkan memahami kondisi saat ini.

"Kami akan coba optimalkan penyaluran yang berasal dari Tarakan sembari menunggu perbaikan jalan selesai," bebernya.

Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Pertamina

ina Rayon VI Kaltimut, Gatot Subroto saat dikonfirmasi menyampaikan untuk mobil truk angkutan LPG sudah dievakuasi. Saat ini, akses lalulintas kendaraan dapat berjalan normal kembali. "Alhamdulillah, truck sudah terevakuasi," tuturnya.

Berkaitan dengan kondisi jalan yang longsor tersebut, kata dia tinggal bagaimana pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi melakukan penguatan dan perbaikan jalan yang ada. (tin/and)

Editor: Andhika



ISTIMEWA

Antrean Kendaraan sebelum mobil truk angkutan LPG dievakuasi.



DZAIDES
KAWANAN ES BUAH

YUK COBAIN!



ES CHARLES



ES TAPE
PANGKAS



MAKAN LEMPES
DITUNGGAL HUTAN



ES NUSANTARA



ES RUMPUT
MAKAM



ES JANDA

Kabar gembira untuk kalian pecinta buah!
tekanang buah-buahan favorit kalian bisa dinikmati
dengan sajian yang nyegerin, wajib deh nyobain!

DZAID ES ADA 4 CABANG LOHI!

- 📍 JL Urip Sumaharjo, Kec Biatan
- 📍 JL Murjani, Berau
- 📍 JL H.A.R.M Ayoeb, Kilo 5, Berau
- 📍 JL Kusuma Bangsa, Kota Tarakan

☎️ 0813 9441 5591 📷 eswra513





ISTIMEWA

Suasana apel dan pelepasan kegiatan pembinaan fisik atau lari Satpol PP Kukar.

Ikuti Pembinaan Fisik dan Lari, Ratusan Personel Satpol PP Dilepas Sekkab Kukar

TENGGARONG - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, secara resmi melepas kegiatan Pembinaan Fisik atau Lari yang dilakukan oleh seluruh personel Satpol PP Kukar. Bertempat di Halaman Kantor Satpol PP Kukar, pada Senin (22/4/2024) pagi.

Dalam sambutannya, Sekkab Sunggono pun menyebut kegiatan pembinaan fisik atau lari ini sekaligus untuk melakukan pembinaan fisik dan mental bagi personel Satpol PP Kukar. Diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan mendukung tugas personel di lapangan. Serta sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

"Agar seluruh anggota Satpol PP mempunyai mental dan fisik yang kuat untuk menjalankan tugas se-

tiap harinya. Dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, dan perlindungan masyarakat," ucap Sunggono.

Seperti diketahui, pekerjaan yang banyak menyertai para personel Satpol PP Kukar. Tidak hanya sebagai tenaga administrasi di kantor saja, namun juga bertugas ke lapangan. Seperti melakukan razia, penertiban masyarakat atau suatu badan usaha yang melanggar perda atau perkara. Serta melaksanakan pengamanan suatu acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Hal inilah yang mendasari pentingnya kebugaran fisik bagi seluruh personel Satpol PP Kukar. Selain itu, juga diperlukan langkah-langkah

strategis agar Satpol PP Kukar sebagai penegak perda dapat memaksimalkan peran dalam setiap kegiatan dan efektif dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Terlebih, saat ini sudah mendekati tahapan Pilkada juga akan dimulai. Yakni diantaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakilnya. Hal ini tentunya, akan menjadi tugas dan fokus bersama untuk mensukseskan penyelenggaraannya. Baik dari sisi kelancaran, ketertiban dan keamanan proses pelaksanaannya.

"Diharapkan, pelaksanaan kegiatan dengan penuh semangat dan niatkan sebagai ibadah agar kita memperoleh hasil yang maksimal dan tentunya dapat dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua," tutup Sunggono. (adv)

DP2KB Kukar Siapkan Toko Kencana, Upaya Tingkatkan Program KB

TENGGARONG - Sejumlah upaya dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara (Kukar), untuk meningkatkan pelayanan dari Program Keluarga Berencana (KB). Salah satunya dengan program Toko Kencana (Keluarga Berencana).

Seperti yang dipaparkan oleh Plt Kepala DP2KB Kukar, Arianto, program Toko Kencana akan digulirkan tiap pekannya. Yakni saat pelaksanaan kegiatan Car Free Day (CFD), di sepanjang Jalan KH Akhmad Muksin hingga Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau.

"Pelayanan dari kawan-kawan DP2KB Kukar bagi masyarakat untuk pemasangan KB gratis, membuka stand saat CFD untuk memberikan pelayanan. Optimalisasi pelayanan KB, mendatangi warga salah satunya di CFD," ujar Arianto, Senin

(22/4/2024).

Lebih jelas, Arianto mengatakan menasarak kelompok remaja dan pasangan yang berada pada masa subur. Dimana memberikan edukasi kepada kelompok remaja, betapa pentingnya program KB. Sementara bagi pasangan yang subur, mengajak mereka untuk ikut serta dalam program KB. "Kami rapat Jumat lalu, saya pimpin rapat terkait pelayanan kegiatan dan ini menjadi fokus kita untuk menggalakkan dengan program Toko Kencana," lanjutnya.

Meski Arianto tidak menampik, selain meningkatkan pelayanan dan edukasi program KB untuk masyarakat, juga meningkatkan kesadaran betapa pentingnya program KB. "Kendalanya tidak hanya menyiapkan pelayanan, juga meningkatkan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya program KB," tutupnya. (adv)



ISTIMEWA

Plt Kepala DP2KB Kukar, Arianto

Desa Embalut Sulap Lahan Eks Tambang untuk Kawasan Pertanian Jagung

TENGGARONG - Pemerintah Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, terus berupaya meningkatkan potensi desanya. Salah satunya, menyulap lahan eks tambang menjadi kawasan pertanian jagung. Langkah ini diambil, untuk memastikan lahan yang sudah dikeruk kekayaan alamnya itu, masih bisa terus dimanfaatkan dan produktif.

Kepala Desa (Kades) Embalut, Yahya Basri Markusin, sedikitnya ada total lahan seluas 200 hektare (ha) paska tambang yang dapat dimanfaatkan kembali, menjadi lahan pertanian jagung.

Walaupun musim kemarau kerap menjadi salah satu kendala yang dihadapi, namun produksi jagung masih dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh petani ataupun kelompok tani di desa tersebut.

"Saya telah memesan bibit jagung yang dapat menghasilkan 4-5 tongkol dalam satu pohon dari Jawa, dan saya akan membagikannya kepada



ISTIMEWA

Kepala Desa Embalut, Yahya Basri Markusin.

petani," ungkap Yahya Basri.

Dan ini pun bukan yang pertama mereka menanam di atas lahan eks tambang. Namum sudah memasuki kali keempat, dan ia pun optimis, apa yang dikerjakannya bersama

masyarakat akan berbuah manis.

Upaya yang dilakukannya ini, diakuinya tidak terlepas dari bagian dari program Bupati, yang mengalokasikan sebagian lahan eks tambang untuk menjadi lokasi lahan budidaya jagung. Terbukti berhasil karena mampu memasuki musim tan yang keempat kalinya.

Dengan adanya program ini, diharapkan produksi jagung dapat meningkat dan memberikan manfaat ekonomi yang baik bagi masyarakat Desa Embalut. Terutama bagi kelompok tani yang menggarap lahan eks tambang tersebut. Program ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mendukung program revolusi jagung yang telah dicanangkan Pemkab Kukar sebelumnya.

"Kami berterima kasih kepada bupati atas alokasi lahan tersebut. Dulu sulit menjual jagung karena tidak adanya pasar, namun sekarang sudah ada permintaan yang cukup besar," tutupnya. (adv)

Seleksi Pemuda Pelopor kembali Dibuka Dispora Kukar



Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni

TENGGARONG - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar), dalam waktu dekat akan menggelar seleksi dan pembinaan pemuda pelopor, untuk pemuda dan pemudi Kukar yang berprestasi. Sebanyak 13 bidang dari 3 kategori yang akan diseleksi oleh Dispora Kukar. Yakni masing-masing Pembinaan Pemuda Pelopor, Pembinaan 8 bidang kreativitas pemuda dan Pembinaan Pemuda Berprestasi dan Pramuka Berprestasi.

Seperti yang tertuang dalam surat resmi Dispora Kukar, pendaftaran akan dimulai sejak Maret hingga 26 April 2024. Secara bertahap, akan mengikuti seleksi ditingkat provinsi hingga ke tingkat nasional.

Bidang yang akan diseleksi sendiri, diantaranya Bidang Pendidikan; Bidang Seni Budaya; Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, lingkungan dan Pariwisata; Bidang Pangan dan Bidang Inovasi Teknologi untuk Kategori Pembinaan Pemuda Pelopor.

Untuk kategori Pembinaan 8 bidang kreativitas pemuda, diantaranya Bidang Musik, Bidang Kuliner, Bidang Grafika, Bidang Kriya, Bidang Fashion, Bidang Film, Bidang TI Perangkat Lunak dan Bidang TI Perangkat Keras.

“Dalam rangka memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para pemuda-pemudi yang berprestasi diberbagai bidang, sesuai dengan bidang yang telah ditempuh sesuai dengan bakat dan minatnya,” ucap Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, dalam surat resminya.

Lebih lanjut, untuk petunjukt teknis proses seleksi, dapat dilihat melalui kanal resmi www.kemenpora.go.id atau di www.disporakaltim.info, sementara untuk pendaftaran dapat dikirim melalui email bidangpemuda26@gmail.com.

“Memiliki karya nyata berkualitas yang dilaksanakan secara konsisten dan gigih serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Aji Ali Husni. (adv)

Kelurahan Baru Prioritas Bangun Infrastruktur Publik

TENGGARONG - Upaya peningkatan infrastruktur, terus dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk tahun ini saja, total ada 10 paket pembangunan dan peningkatan yang berhubungan dengan sejumlah ruas jalan di kelurahan tersebut.

Seperti yang disampaikan Lurah Baru, Bayu Ramanda, peningkatan infrastruktur memang masih menjadi prioritasnya. Bertujuan untuk memastikan kemudahan konektivitas dalam wilayah kelurahan, sekaligus meningkatkan kenyamanan warga yang tinggal di wilayah tersebut.

“Untuk alokasi anggaran pembangunan jalan kita berkolaborasi dengan sejumlah pihak. Antaranya bersumber dari dana aspirasi, anggaran Dinas Pekerjaan Umum, termasuk Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat,” ujar Bayu.

Bayu kemudian menjelaskan bahwa rencana peningkatan infrastruktur itu melibatkan sejumlah aspek, seperti peningkatan kualitas jalan dan gang di beberapa Rukun Tetangga (RT). Setidaknya kata pria tersebut total panjang jalan yang di tingkatkan kualitasnya mencapai satu kilometer.

Bayu kemudian merinci, proyek peningkatan jalan pada sejumlah RT di wilayah tersebut rata-rata mencapai 100 meter, pekerjaannya meliputi pengerasan badan jalan, betonisasi, hingga pengaspalan. Sementara total anggaran yang di alokasikan untuk menuntaskan

seluruh peningkatan badan jalan tahun ini, mencapai Rp 1,5 miliar.

“Kami berharap dengan peningkatan jalan ini akan meningkatkan kenyamanan konektivitas antar wilayah RT dan memudahkan aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (adv)



Lurah Baru, Bayu Ramanda

Dinsos Kukar Keluarkan Juknis BPJS Kesehatan Bagi Pasien Darurat

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, terus mengimbau dan meminta masyarakat untuk bisa segera mengurus kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemkab Kukar.

Salah satunya dengan mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan yang bersifat mendesak atau emergency. Masyarakat yang masuk kategori PBI yang sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan (faskes). Diantaranya sedang menjalani rawat inap di Puskesmas Rawat Inap atau rumah sakit, sedang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan dan masa kontrol setelah menjalani rawat inap.

Juknis ini sekaligus menjelaskan



ISTIMEWA

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Hamly

bahwa warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan kategori PBI, dapat mengurus BPJS Kesehatan-nya melalui petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di masing-masing kelurahan dan desa.

“Pasien yang sekarang dirawat

pasiennya tapi kartunya mati bisa diurus di desa dan gak perlu jauh-jauh ke Dinsos Kukar (di Tenggarong),” ujar Kepala Dinsos Kukar, Hamly.

Masyarakat atau pasien yang menjalani perawatan mendesak, hanya cukup melampirkan sejumlah dokumen kepada petugas Puskesos di desa atau kelurahan untuk kemudian diunduh ke https://bit.ly/Daftar_BPJSKes_Emergensi. Diantaranya Surat Pengantar dari desa/kelurahan, surat permohonan dari yang bersangkutan atau orangtuanya.

Kemudian surat keterangan rawat inap dari puskesmas atau rumah sakit, atau surat rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Serta Kartu Keluarga Kutai Kartanegara dan KTP yang bersangkutan.

“Harapannya dapat memudahkan para warga (yang mendesak) dalam mengurus BPJS Kesehatan,” tutup Hamly. (adv)

Infrastruktur Jalan Jadi Fokus Pembangunan Kelurahan Maluhu

TENGGARONG - Sejumlah rencana pembangunan di Kelurahan Maluhu, dipaparkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat kecamatan. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal penting, terutama pembangunan akses jalan.

Disampaikan Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, pembangunan jalan baru, berupa gang-gang kecil menjadi prioritas yang coba diusulkan dan dikerjakan di 2024 ini. Disamping membangun infrastruktur drainase, irigasi pertanian hingga pengurusan badan jalan.

“Sebenarnya kan karena berkembangnya waktu dan penambahan penduduk dan permukiman, akhirnya ada jalan-jalan baru,” ujar Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro.

Dijelaskan Tri Joko Kuncoro, pembangunan jalan kecil atau gang ini, karena adanya bangunan pemukiman di atas lahan yang awalnya masing kosong. Secara perlahan, gang-gang yang ada saat ini dibangun swadaya oleh warga sekitar, sehingga jalannya masih berstruktur batu-batu.

Namun yang saat ini dianggap urgensi, yakni pembangunan kembali Kantor Kelurahan Maluhu yang ludes terbakar, pada Rabu (10/4/2024) lalu. Yang menghancurkan seluruh bangunan hingga berkas dokumen dan aset penting kantor. Baik itu milik pemerintah Kelurahan Maluhu maupun milik pribadi pegawai Kelurahan Maluhu.

Iapun berkeinginan untuk merenovasi dan membangun ulang sejumlah lembaga di Kelurahan Maluhu. Seperti bangunan LPM, PKK, Karang Taruna. Yang memang kondisinya sudah sangat tidak layak dan rawan jika tetap ditempati. “Saya usulkan tahun ini juga, kalau itu kami belum dapat kapan dibangun,” tutup Tri Joko Kuncoro. (adv)



ISTIMEWA

Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro

Infrastruktur Jalan Masih Jadi Prioritas di Kecamatan Kota Bangun Darat Berdasarkan Musrenbang

TENGGARONG - Pembangunan infrastruktur, masih jadi fokus sejumlah kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar), salah satunya Kecamatan Kota Bangun Darat. Kecamatan termuda, hasil pemekaran Kecamatan Kota Bangun. Untuk tahun 2024, dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), pembangunan infrastruktur berupa jalan jadi prioritas.

Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, secara umum jalan antar desa, jalan produksi untuk sektor pertanian, perkebunan banyak masuk dalam usulan musrenbang yang digelar belum lama ini. Usulan ini disampaikan mengingat potensi pertanian dalam arti luas di Kecamatan Kota Bangun Darat yang cukup besar.

“Karena mengingat potensi pertanian cukup (besar) signifikan. Irigasi jadi salah satu prioritasnya,” ungkap Camat Kota Bangun Darat, Julkifli.

Infrastruktur penghubung antar desa pun juga menjadi prioritas. Mengingat ada 10 desa yang berada di Kecamatan Kota Bangun Darat. Perlu akses yang mumpuni, terutama untuk menuju ke Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat. Memudahkan masyarakat untuk melakukan urusan administrasi kependudukan.

Karena sejauh ini, akses menuju kantor kecamatan yang terbilang terbatas. Ketika diguyur hujan dalam waktu cukup lama, tidak bisa dilalui. Sehingga masyarakat harus memutar jauh, dengan perbedaan

waktu mencapai 1 jam. Terutama masyarakat yang berada di Desa Wonosari.

“Harus keliling dengan beda waktu 1 jam, masyarakat kesulitan mau urusan administrasi, kecuali sangat urgen,” lanjut Julkifli.

Memang diketahui, pada tahun 2024 ini Kecamatan Kota Bangun Darat akan mendapatkan kurungan Rp 48-50 miliar. Untuk menghubungkan Desa Sukabumi tepatnya di depan jalan poros, hingga Desa Wonosari (Kota Bangun 7). Dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 48-50 miliar.

“Harapannya pembangunan sesuai target dan pelayanan ke masyarakat bisa maksimal,” tutup Julkifli. (adv)

Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat Segera Dibangun, Tahun Depan Mulai Operasional

TENGGARONG - Pembangunan Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat, dipastikan akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Proses pembangunan yang seharusnya terlaksana pada 2023 lalu, akan mulai berprogres pada awal Mei 2024 ini.

Dijelaskan Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, kantor kecamatan akan berdiri di atas lahan 2,7 hektare (ha), dari total lahan yang disiapkan mencapai 7,25 ha. 4 ha lebih sisanya akan diperuntukkan untuk membangun Polsek Kota Bangun Darat dan Koramil Kota Bangun Darat. “Pembangunan kantor camat pada murni APBD Kukar, dengan estimasi alokasi miliar,” ujar Julkifli.

Direncanakan, pembangunan kantor kecamatan yang dibangun di Desa Kedang Ipil ini, akan berjalan selama 6 bulan kedepan. Ditargetkan rampung pada bulan November 2024, selanjutnya menjalani serah terima pada bulan Desember 2024. “Bulan Desember penyerahan (ke pemerintah kecamatan) dan Januari 2025 sudah operasional,” lanjut Julkifli.

Tidakhanya infrastruktur bangunan kantor kecamatan-nya saja. Julkifli pun menyebut akses jalan menuju ke kantor kecamatan yang baru pun sedang dikebut. Dengan waktu pelaksanaan dan pengerjaan yang sama. Yakni pada awal Mei 2024. Harapannya rampung bersamaan dengan infrastruktur fisik kantornya.

Yakni pembangunan jalan dari Desa Sukabumi tepatnya di depan jalan poros, hingga Desa Wonosari (Kota Bangun 7). Dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 48-50 miliar. “Harapannya pembangunan sesuai target dan pelayanan ke masyarakat bisa maksimal,” tutup Julkifli. (adv)



Camat Kota Bangun Darat, Julkifli

ISTIMEWA



Camat Kota Bangun Darat saat membagikan armada pengangkut sampah.

ISTIMEWA

10 Desa di Kecamatan Kota Bangun Darat Dapat Armada Pengangkut Sampah

TENGGARONG - Secara perlahan, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kutai Kartanegara (Kukar), mulai menangani permasalahan sampah di wilayahnya. Diketahui menjadi salah satu permasalahan mendasar di wilayah tersebut. Yakni dengan mendapatkan distribusi armada pengangkut sampah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Total sebanyak 10 desa di Kecamatan Kota Bangun Darat, akhirnya mendapatkan armada pengangkut sampah roda 3. Merupakan pembagian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar. Masing-masing armada pengangkut sampah tersebut, diserahkan langsung oleh Camat Kota Bangun

Darat, Julkifli, pada Maret 2024 lalu. Kepada masing-masing kepala desa (kades).

Dijelaskan Julkifli, armada pengangkut sampah tersebut merupakan pengadaan yang dilakukan pada APBD Perubahan Kukar 2023. Namun, serangkaian pemenuhan administrasi, maka baru diserahkan pada awal 2024 ini.

“Menunggu administrasi makanan baru diserahkan kepada desa, sebelum lebaran sudah dibagikan,” ungkap Julkifli.

Dengan adanya armada pengangkut sampah ini, diharapkan internal desa bisa mengatasi permasalahan sampahnya. Selanjutnya dikumpulkan dan lanjut dibuang ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang berada di Desa Loleng. Bergabung bersama dengan Kecamatan Kota Bangun.

Sementara untuk penanganan sampah jangka panjangnya, Kecamatan Kota Bangun pun direncanakan mendapatkan kembali armada pengangkut sampah. Yakni berupa dua unit truk besar pengangkut sampah. Setelah mengangkut sampah dari masing-masing desa yang sudah dikumpulkan.

“Untuk jangka panjang kami punya progres pengangkutan sampah yang akan ditangani DLHK dengan menyerahkan armada truk sampah sebanyak 2 unit,” tutupnya. (adv)



Good Governance Dipertahankan, Berantas KKN

TANJUNG SELOR - Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H, S.I.K, M.Si, membuka Taklimat Awal Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (itwasda) Polda Kaltara tahap I tahun 2024, Aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, Senin (22/04/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Irwasda Polda Kaltara Kombes Pol. Drs. Andria Martinus, M.H, Pejabat Utama Polda Kaltara, Kapolres dan Kapolresta Jajaran Polda Kaltara.

Dalam rangka mewujudkan good governance, khususnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintahan menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Tujuan Audit Kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh Itwasda bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi berupa mengidentifikasi dan mengukur risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Serta mengelola dengan tepat atas risiko signifikan pada organisasi, manajemen organisasi dapat merespon setiap risiko dengan tepat sesuai kapasitas organisasi. "Saya mengharapkan kerjasama yang baik antara auditor atau perwira, pemeriksa dengan seluruh auditi, sehingga tujuan pelaksanaan audit dapat tercapai" ujar Irwasda Polda Kaltara.

Kemudian dalam sambutannya, Kapolda Kaltara menyampaikan bahwa fungsi pengawasan merupakan suatu proses yang sistemik dalam menerapkan standar atau ukuran kinerja, dalam rangka pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

"Kegiatan audit kinerja dapat dijadikan sebagai sarana untuk berkonsultasi, sehingga pelaksanaan program kerja anggaran tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan tertib administrasi," terangnya.

Kapolda Kaltara berharap, kepada para auditor agar bisa menjadi tauladan yang baik dalam memberikan dan juga tentunya berperilaku bertutur kata serta bertanggung jawab dan bisa bekerja sama dalam melaksanakan tugas serta menjadi konsultan yang dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan pekerjaan Polri.

Kapolda mengajak untuk bekerjasama dengan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan kegiatan audit kinerja, serta melakukan suatu keterbukaan dalam men-



HUMAS POLDA KALTARA

Kapolda Kaltara berikan arahan pada saat Taklimat Awal Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (itwasda).



yampaikan data sesuai dengan fakta yang ada.

"Harapan tercapainya tujuan organisasi Polri khususnya Polda Kaltara demi terwujudnya penetapan tata kelola manajemen resiko dan pengendalian internal yang lebih optimal," pungkasnya. (adv/tin/and)

Editor: Andhika



HUMAS POLDA KALTARA

Pemusnahan miras menggunakan alat berat.

Ratusan Botol Miras Ilegal Dimusnahkan

TANJUNG SELOR - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) kembali musnahkan barang bukti minuman keras beralkohol sebanyak 980 botol, bertempat di Mapolda Kaltara pada Senin (22/04/2024).

"Minuman keras ini ilegal dan tidak menggunakan izin. Sehingga kami lakukan penyitaan," kata Dirreskrim Polda Kaltara Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K, S.H, M.H., yang di wakili oleh Kopol Maulana.

Dikatakannya, penyitaan terhadap ratusan botol minuman keras itu dilakukan pada Jum'at 29 September 2023 sekitar jam 22.30 Wita pelapor mendapatkan informasi bahwa ada tempat yang sedang menjual Minuman Keras (Miras) dengan berbagai merk di Gang Mandala Jl. Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara.

Setelah itu personil Kepolisian Ditreskrim Subdit III Jatanras Polda Kalimantan Utara memasuki rumah kontrakan milik saudara Z.A, ditemui beberapa minuman beralkohol minuman keras dan langsung diamankan.

Beberapa jenis minuman yang dia-

mankan, antara lain 598 Botol Anggur Merah, 89 Botol Newport Passion Blue (Biru), 31 Botol Newport Red (Merah), 1 Botol Newport Revolution (Kuning), 162 Botol Anggur Hijau Kawawa-Kawa, 4 Botol Iceland 700 ml, 48 Botol Iceland 500 ml, 5 Botol Black Jack's, 20 Botol Singa Raja, dan 22 botol Gilbey's Vodka.

"Ada tiga pelaku yang berhasil diamankan, satu diantaranya masih DPO masing-masing berinisial Z.A, R.S, dan M.S, sedangkan yang DPO berinisial H.F," ujarnya.

Kopol. Maulana menambahkan, Polisi menyita 980 Botol, terdiri dari 10 Merk Minuman keras beralkohol yang disisihkan sebagian sebanyak 1 Botol untuk digunakan sebagai sample barang bukti di laboratorium dan 9 merek minuman keras beralkohol tersebut disisihkan sebagian untuk digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

"Sehingga total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 961 botol minuman keras beralkohol," ujarnya.

Modus Operandi yang dijalankan oleh Pelaku untuk Memanfaatkan penjualan minuman keras beralkohol tersebut dengan menyimpan di salah satu rumah tepatnya di dalam

kamar kontrakan milik saudara Z.A tanpa memiliki surat perizinan di bidang perdagangan.

Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 106 ayat 1 KUHP, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Di dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Jo Pasal 55 KUHP.

"Polda Kaltara akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terhadap siapapun yang berani memperdagangkan barang-barang ilegal di wilayah Kaltara," pungkasnya. (adv/tin/and)

Editor: Andhika

Sertifikasi Lahan Masyarakat Bulungan Mencapai 75 Persen

TANJUNG SELOR - Gerakan sinergi reforma agraria kembali dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan, dengan menyoal warga di Kecamatan Tanjung Selor Hulu, Senin (22/4/2024).

Kepala BPN Bulungan, Lena Purnama Sari mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkontribusi terhadap gerakan sinergi reforma agraria.

BPN Bulungan, lanjut Lena terus berupaya meningkatkan untuk asas reforma agraria. "Termasuk kita sinkronkan dengan penataan aset," ujar Kepala BPN Bulungan, Lena Purnama Sari, kepada media ini.

Kemudian, perangkat daerah dan BPN Bulungan melakukan pendampingan terkait access reform atau penataan akses. Pihaknya berharap kedepan masyarakat lebih bertambah dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi untuk subjek reforma agraria.

Ia menambahkan, masyarakat juga bisa mendaftarkan tanahnya. Selain itu, tidak ada ketimpangan dalam penguasaan kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Di Kabupaten Bulungan, lanjutnya animo masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah tergolong tinggi, data yang di catat oleh BPN secara persentase sudah mencapai 75 persen. "Iya, untuk di Bulungan sudah mencapai 75 persen masyarakat yang telah mengurus sertifikat tanahnya," jelasnya.

Saat ini, sambung Lena, ada beberapa desa yang sudah tersentuh pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Menyoal banyaknya lahan perkebunan di Bulungan, Lena menyatakan bahwa hal itu akan disesuaikan dengan tata ruang.

Bahkan bisa didaftarkan sepanjang tanah yang dikuasai para petani, tidak ada sengketa dan sesuai dengan tata ruang. Diungkapkan, melalui PTSL, BPN Bulungan mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya.

Pada tahun lalu, pihaknya sudah melakukan foto udara pada tujuh kelurahan di Kabupaten Bulungan. Lahan yang sudah difoto udara dapat ditindaklanjuti dengan sertifikat tanah.

Sehingga, seluruh lahan di Bulungan tersertifikasi. Hal ini akan



Kepala BPN Bulungan, Lena Purnama Sari saat diwawancarai oleh awak media.

MARTIN/MKR

memastikan bahwa semua lahan di wilayah Bulungan memiliki sertifikasi yang sah.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan Kilat saat dikonfirmasi mengapresiasi kinerja lembaga eksekutif dalam hal pengurusan sertifikasi lahan masyarakat. Dikatakan, jika hari ini pencapaian sertifikasi lahan masyarakat belum sepenuhnya rampung diharapkan itu menjadi perhatian kedepan sehingga bisa lebih maksimal lagi.

"Kita apresiasi lah atas pencapaian tersebut, dan berharap angka persentase pengurus sertifikasi lahan masyarakat ini tiap tahun terus ditingkatkan maksimal," ujar Kilat.

Sertifikasi lahan, kata dia disamping sebagai pengakuan tanah yang menjadi hak milik, juga sebagai pengakuan atas tanah yang dikelola oleh masyarakat. Legalitas hukumnya semakin kuat sehingga tidak menimbulkan kontra hukum dikemudian hari. "Selain itu, juga kita berharap ada pemasukan bagi daerah dalam bentuk pajak," harapnya.

Politisi partai Gerindra ini mene-

gaskan, kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan legalitas lahan transmigrasi masyarakat. Karena, jangan sampai itu akan menimbulkan persoalan kemudian hari.

"Selain itu, kita juga menegaskan terhadap lahan masyarakat khususnya di wilayah transmigrasi, untuk dikawal. Jangan sampai setelah memiliki status hak milik dengan mudah dijual atau dipindah tangankan. Kita berharap itu tidak terjadi lah," tuturnya.

Oleh karena itu, perlu peran penting dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal pentingnya legalitas lahan menjadi hak milik mereka.

Kalaupun itu terjadi, minimal penguasaan lahan itu sudah diatas 10 tahun. Dan kalau program transmigrasi itu dilakukan hanya sebagai tujuan untuk memiliki lahan lalu kemudian dijual kembali atau dipindahtangankan berarti program transmigrasi belum sepenuhnya sesuai keinginan pemerintah. (tin/and)

Editor: Andhika



ADE/MKR

Kepala BMKG Kota Tarakan, M. Sulam Khilmi.

BMKG: Letusan Gunung Ruang tidak Berdampak di Kaltara

TARAKAN - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Tarakan, M. Sulam Khilmi menyebut letusan Gunung Ruang, Sulawesi Utara tidak berdampak di Kaltara.

Hal itu disampaikan Khilmi kepada awak media di Tarakan, Senin (22/4/2024), menyusul adanya keluhan masyarakat yang mengalami gatal akibat senyawa kimia Sulfur Dioksida (SO₂) tercampur dengan air hujan usai terjadi letusan Gunung Ruang.

Menurutnya, SO₂ merupakan partikel ringan yang berada di ketinggian di atas 10 kilometer sehingga tidak berpengaruh terhadap air hujan. Namun dia menyebut intansi yang memiliki kewenangan merilis hal itu, yakni Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

“Secara garis besar SO₂ itu partikel yang ringan. Jadi ketinggiannya di atas 10 kilometer. Artinya

tidak sampai di bawah awan-awan hujan,” katanya.

Kendati demikian, dampak letusan Gunung Ruang sempat dikawatirkan sejumlah maskapai penerbangan. Hal ini berkaitan dengan adanya abu vulkanik yang dapat merusak mesin pesawat dan mengganggu penerbangan.

“Kalau ukuran (abu) lebih besar dari ketentuan penerbangan tentu akan menyebabkan gangguan pada mesin pesawat. Makanya beberapa waktu lalu kami cek tidak ada pengaruhnya di Kaltara,” tegasnya.

Khilmi memastikan bahwa cuaca yang terjadi belakangan di Kaltara, tidak ada kaitannya dengan letusan Gunung Ruang.

BMKG, kata dia, sejak 16 April lalu telah merilis cuaca di Kaltara seminggu ke depan. Diketahui, wilayah Kaltara terjadi potensi hujan ringan, sedang dan lebat.

“Kembali lagi saya sampaikan

tanggal 16 seminggu ke depan Kaltara berpotensi hujan sedang hingga lebat. Di Tarakan inikan cuacanya memang tidak merata ya, hujannya parsial. Namun sebagian wilayah Kaltara Malinau tanjung Selor itu memang dominan hujan seminggu ke depan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara pada Rabu, (17/4/2024), diklaim sebagai letusan gunung api terdahsyat di Indonesia selama setengah abad terakhir. Pola letusannya bahkan terpantau oleh alat citra satelit, karena ada lebih dari 200 juta meter kubik magma dense-rock-equivalent (DRE) yang disemburkan ke udara. Masyarakat pun khawatir akibat letusan ini mengakibatkan dampak terhadap udara dan air hujan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



ADE/MKR

Kondisi jalan di sekitar Bandara Juwata Tarakan yang terlihat gelap.

Pemasangan PJU di Jalan Sekitar Bandara Juwata Terkendala UU Penerbangan

TARAKAN - Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Aki Balak tepatnya di depan Bandara Juwata Tarakan terkendala Undang-undang Keselamatan Penerbangan.

Hal itu disampaikan Pj Wali Kota Tarakan, Bustan kepada awak media baru-baru ini. "PJU di dekat bandara itu terkendala dengan Undang-undang Keselamatan Penerbangan. Jadi hanya satu titik diizinkan oleh otoritas penerbangan," kata Bustan.

Bustan tak menampik banyak masyarakat yang mengeluh minimnya penerangan di sekitar lokasi, sehingga rawan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, Pemerintah Kota Tarakan akan berusaha mencari solusi untuk masalah tersebut.

Pihaknya pun telah bersurat dan

berkomunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan. "Saya tadi sudah telpon OPD kepala Dinas Perhubungan, memastikan ada informasi dari masyarakat bahwa ada jalan gelap sehingga menyebabkan kecelakaan warga, makanya saya langsung komunikasi dengan OPD teknis supaya saya juga paham ternyata ada hal yang harus disampaikan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Sukarman mengungkapkan, pihaknya telah menyurat kepada Otoritas Bandara (Otban) Balikpapan untuk memasang PJU. Namun, hal tersebut tidak diperbolehkan karena mengganggu keselamatan penerbangan.

"Artinya lebih mementingkan keselamatan penerbangan makan-

ya tahun ini kita pasang satu dari simpang Lanud ke arah sana (arah STM)," ujar Sukarman.

Dia menjamin akan terus berkoordinasi karena menurutnya di kota-kota besar bisa saja PJU dipasang namun, karena ada ketentuan yang harus diikuti pihak Otban sehingga pihaknya tidak berani mengambil tindakan. Dengan adanya ketentuan tersebut pihaknya pun tidak dapat berbuat apa-apa.

"Mungkin ada ketentuannya, namanya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Ada jarak dan ketinggian yang diperkenankan. Ini masih berkomunikasi," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia
Editor: Andhika



Kepala Lapas Kelas II, Sutarno saat menunjukkan salah satu produk buatan narapidana.

ISTIMEWA

Lapas Tarakan Launching dan Pasarkan Produk Unggulan Narapidana

TARAKAN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan melaunching sejumlah produk unggulan buatan narapidana, diantaranya batik, kue, sofa, dan rak piring portable.

Sejumlah produk unggulan ini dibuat melalui program Bimbingan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan Sutarno melalui Kepala Seksi (Kasi) Kegiatan Kerja Andhika Abrian mengaku telah melakukan pemasaran produk unggulan narapidana melalui kegiatan Bangga Menggunakan Produk Dalam Lapas.

Selain itu, jajarannya secara aktif melakukan serangkaian kegiatan promosi dan penawaran khususnya melalui pembelian E-Katalog.

“Pada peringatan HBP Ke-60 ini terdapat satu program baru yang berkaitan dengan pemberdayaan produk hasil karya WBP. Kegiatan Bangga Menggunakan Produk Lapas ini kami berhasil menjual

produk hasil fabrikasi las berupa rak piring portable berkualitas premium kepada UPT Lapas Kelas IIA Tarakan,” katanya di Tarakan, Senin (22/4/2024).

Dia menjelaskan dari hasil penjualan, penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mencapai Rp 5.160.000, dengan persentase penyerapannya sebesar 3 persen dari Nilai DIPA T.A 2024 yang tersedia.

Program ini, kata dia, berjalan atas koordinasi dan kerjasama antar jajaran PPK, Keuangan hingga Tim Produksi Kegiatan Kerja serta Mitra Pihak ketiga.

Harapannya dapat menjadi pendorong dari upaya mempromosikan program pembinaan WBP serta peningkatan nilai penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional.

Selain penjualan produk melalui E-Katalog akun sektoral Kumham, Seksi Giatja juga gencar melakukan penawaran dan penjualan produk

unggulan hasil karya Narapidana lainnya yang terdiri dari bidang Manufaktur, Jasa hingga Agribisnis melalui Galeri Produk Unggulan Narapidana.

Target pembeli dari program ini terdiri dari masyarakat, petugas hingga WBP di Lingkungan Lapas Kelas IIA Tarakan.

Dari beragam produk yang ditawarkan salah satu yang menjadi daya tarik adalah Produk Kain Batik Lokal Khas Kota Tarakan yang mengusung konsep design etnik suku dayak.

Dia berharap melalui program ini semakin menambah kuantitas promosi produk unggulan WBP.

“Semoga seluruh pihak dapat turut serta dalam mempromosikan dan membeli serta menggunakan produk dalam Lapas sehingga dapat mengapresiasi program pembinaan bagi WBP serta PNBP Kegiatan Kerja itu sendiri,” pesannya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



TERVERIFIKASI
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



KEMENTERIAN PUPR MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN HUNIAN DI IKN

BACA HALAMAN 2-4



**DIGADANG MAJU
PILKADA 2024,
MAKMUR MARBUN:
SAYA IKUT ARAH ANGIN
BACA HALAMAN 35**



ANTARA/HO-KEMENTERIAN PUPR

Pembangunan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kementerian PUPR Mempercepat Pembangunan Hunian di IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mempercepat pembangunan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pascalibur panjang Hari Raya Idul

Fitri, pembangunan hunian di IKN kembali dilanjutkan. Para pekerja konstruksi sudah kembali bekerja di lapangan untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur dasar dan perumahan di IKN," ujar Direktur Jenderal

Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, di Jakarta, Senin.

Kementerian PUPR kembali melanjutkan pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri di IKN pascalibur Hari Raya Idul Fitri.

Berbagai target pembangunan hunian, seperti rumah susun (rusun) maupun Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) serta berbagai infrastruktur dasar diharapkan bisa segera diselesaikan dan difungsikan menjelang perayaan Peringatan HUT ke-79 RI bulan Agustus mendatang.

Iwan menjelaskan, dirinya secara berkala terus melakukan kunjungan kerja ke IKN dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap progres pembangunan hunian di IKN.

Adanya libur panjang kemarin diharapkan mampu memberikan semangat baru kepada para pekerja konstruksi dan pegawai Kementerian PUPR yang bertugas di IKN, untuk memulai dan melanjutkan kembali progres yang ada serta menyele-

saikan target besar yang harus dituntaskan pada pembangunan IKN ini.

Iwan juga menyampaikan beberapa jenis hunian yang sudah dibangun di IKN. Pertama adalah Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap I sebanyak 22 tower setinggi empat lantai yang mampu menampung sekitar 10.700 pekerja.

Kedua adalah Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang saat ini progresnya mencapai 80 persen, dan ada beberapa rumah yang sudah jadi lengkap dengan furnitur di dalamnya dan sisanya masih dalam proses penyelesaian tahap akhir atau finishing.

Selanjutnya adalah pembangunan 47 tower untuk hunian ASN, TNI/Polri dalam bentuk rusun atau apar-

temen. Bangunan vertikal tersebut terdiri dari dua lantai podium sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial dan 10 lantai residensial. Diharapkan sebanyak 12 tower tersebut bisa selesai dan difungsikan dalam beberapa bulan mendatang.

"Untuk HPK saat ini sudah diselesaikan dan dihuni secara penuh dan dikelola serta dimanfaatkan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang terlibat dalam pembangunan IKN. Sedangkan RTJM yang sudah jadi kami jadikan sebagai rumah contoh sebagai bentuk harapan dan optimisme bahwa pembangunan IKN tetap berjalan disamping penyelesaian rusun untuk pemindahan ASN, TNI/Polri untuk mendukung peringatan HUT RI," kata Iwan pula. (ant/mk)



OTORITA IKN

Rapat koordinasi yang diadakan oleh Otorita IKN bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kantor Otorita IKN, Balikpapan, pada hari Senin (22/04/2024).

Otorita IKN Siapkan Mekanisme Pengelolaan Aset Hibah Kabupaten Kukar

NUSANTARA - Sejumlah area di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang termasuk dalam batas kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), saat ini menjadi fokus utama dalam pengelolaan oleh pemerintah Otorita IKN.

Pengelolaan ini mencakup berb-

agai aspek, mulai dari penataan lahan, pengaturan aset fisik, hingga isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat setempat.

Dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Otorita IKN bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

(Kukar) di Kantor Otorita IKN, Balikpapan, pada hari Senin (22/04/2024), kedua pihak mendalami kewenangan terkait pembangunan dan pengelolaan aset di wilayah Kukar yang termasuk dalam batas kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kukar Salehuddin mengungkapkan bahwa ada enam kecamatan di Kukar yang terintegrasi dalam batas kawasan IKN. Salehuddin menambahkan bahwa saat ini, tanggung jawab atas wilayah tersebut masih dipegang oleh Pemerintah Daerah Kukar. Tanggung jawab ini akan terus berlanjut sampai diaktifkannya Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Otorita IKN, di mana kemudian akan ada proses penyerahan wewenang.

"Didasari dari pembagian wilayah maka seluruh aset yang ada di dalam wilayah itu (delineasi Kawasan IKN) baik yang dari Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten Kukar, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), nantinya menjadi milik Otorita IKN untuk dikelola lebih lanjut," jelas Deputy Bidang Sosial, Budaya, dan

Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin.

"Kemudian ada proses penyerahan-penyerahan aset yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sedang berjalan, Pemerintah Daerah Kukar tentunya akan mendukung pembangunan untuk IKN sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara," jelas Alimuddin.

Menurutnya, terdapat beberapa inisiatif yang tengah dipersiapkan menjelang pengelolaan penuh kawasan IKN oleh Otorita IKN, di antaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai dari guru hingga tenaga kerja terampil. "Ini sangat penting untuk mendukung IKN sebagai ibu kota yang futuristik dan adaptif," terangnya.

Dalam hal pengelolaan aset fisik,

DPRD Kabupaten Kukar telah mengusulkan agar aset-aset tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama dengan Otorita IKN.

"Tentunya, kita berharap proses ini (penyerahan aset daerah) segera tuntas supaya kita nanti enak ketika melaksanakan fungsi Pemdasus," pungkas Alimuddin.

Koordinasi antara kedua pihak tersebut berperan sebagai jembatan penting untuk transparansi informasi dan mencapai kesepakatan mengenai kepemilikan wilayah. "Satu hal yang luar biasa bahwa Otorita IKN membuka diri seluas-luasnya," sebut Salehuddin dalam mengapresiasi keterbukaan Otorita IKN. (*/rls)

Pewarta : Robbi Syai'an

Editor : Nicha R

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PILING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Drusen Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



MEDIA KALTIM
4 TH ANNIVERSARY

MEDIA
KALTIM

MEDIA KALTIM

OPEN

GOLF
TOURNAMENT

• 2024 •

27-28 APRIL 2024
LAP. GOLF
TANAH MERAH
SAMARINDA

HOLE
IN ONE



ALL NEW
AVANZA VELOZ



ALL NEW
AGYA

UANG TUNAI
150 JUTA &
100 JUTA

KATEGORI PEMENANG:

BEST GROSS OVERALL **RP 6 JUTA**

BEST NET OVERALL **RP 6 JUTA**

BEST GROSS
(FLIGHT A, B, C, LADIES, SPONSOR)

BEST NET 1
(FLIGHT A, B, C, LADIES, SPONSOR)

BEST NET 2
(FLIGHT A, B, C, LADIES, SPONSOR)

HOLE IN ONE
(HOLE 2, 7, 13, 17)

NEAREST TO THE PIN

LONGEST DRIVE



GRAND
PRIZE



GREEN FEE
REGISTRATION

IDR 1.750.000

INCLUDE:

T-SHIRT UNDER ARMOUR - TAS BOLA

GLOVE (SARUNG TANGAN)

BREAK FAST & LUNCH

INFO PERTANDINGAN **BAKRIE 0852-5050-5151**

INFO PENDAFTARAN **RAVI ABDULLAH 0812-5789-0709**

TRANSFER PENDAFTARAN **BANK MANDIRI**

REK: 1490021061323

AN. PT RADAR DIGITAL NUSANTARA



HOTLINE EVENT & SPONSORSHIP

AGUS SUSANTO 08115802340

ADHI ABDHIAN 08534894392

DARMAN 08115405033



ISTIMEWA

Suasana apel dan pelepasan kegiatan pembinaan fisik atau lari Satpol PP Kukar.

Sekcab Kukar Lepas Ratusan Personel Satpol PP, Ikuti Pembinaan Fisik dan Lari

TENGGARONG - Sekretaris Kabupaten (Sekcab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, secara resmi melepas kegiatan Pembinaan Fisik atau Lari yang dilakukan oleh seluruh personel Satpol PP Kukar. Bertempat di Halaman Kantor Satpol PP Kukar, pada Senin (22/4/2024) pagi.

Dalam sambutannya, Sekcab Sunggono pun menyebut kegiatan pembinaan fisik atau lari ini sekaligus untuk melakukan pembinaan fisik dan mental bagi personel Satpol PP Kukar. Diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan mendukung tugas personel di lapangan. Serta sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

"Agar seluruh anggota Satpol PP mempunyai mental dan fisik yang kuat untuk menjalankan tugas setiap harinya. Dalam menjaga ketentera-

man dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, dan perlindungan masyarakat," ucap Sunggono.

Seperti diketahui, pekerjaan yang banyak menyertai para personel Satpol PP Kukar. Tidak hanya sebagai tenaga administrasi di kantor saja, namun juga bertugas ke lapangan. Seperti melakukan razia, penertiban masyarakat atau suatu badan usaha yang melanggar perda atau perkara. Serta melaksanakan pengamanan suatu acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Hal inilah yang mendasari pentingnya kebugaran fisik bagi seluruh personel Satpol PP Kukar. Selain itu, juga diperlukan langkah-langkah strategis agar Satpol PP Kukar sebagai penegak perda dapat memaksimalkan peran dalam setiap kegiatan

dan efektif dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Terlebih, saat ini sudah mendekati tahapan Pilkada juga akan dimulai. Yakni diantaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakilnya. Hal ini tentunya, akan menjadi tugas dan fokus bersama untuk mensukseskan penyelenggaraannya. Baik dari sisi kelancaran, ketertiban dan keamanan proses pelaksanaannya.

"Diharapkan, pelaksanaan kegiatan dengan penuh semangat dan niatkan sebagai ibadah agar kita memperoleh hasil yang maksimal dan tentunya dapat dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua," tutup Sunggono. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Plt Kepala DP2KB Kukar, Arianto.

Tingkatkan Program KB, DP2KB Kukar Siapkan Toko Kencana

TENGGARONG - Sejumlah upaya dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara (Kukar), untuk meningkatkan pelayanan dari Program Keluarga Berencana (KB). Salah satunya dengan program Toko Kencana (Keluarga Berencana).

Seperti yang dipaparkan oleh Plt Kepala DP2KB Kukar, Arianto, program Toko Kencana akan digulirkan tiap pekannya. Yakni saat pelaksanaan kegiatan Car Free Day (CFD), di sepanjang Jalan KH Akhmad Muksin hingga Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau.

"Pelayanan dari kawan-kawan DP2KB Kukar bagi masyarakat untuk pemasangan KB gratis, membuka stand saat CFD untuk memberikan pelayanan. Optimalisasi pelayanan KB, mendatangi warga salah satunya di CFD," ujar Arianto, Senin (22/4/2024).

Lebih jelas, Arianto mengatakan menyoal kelompok remaja dan pasangan yang berada pada masa subur. Dimana memberikan edukasi kepada kelompok remaja, betapa pentingnya program KB. Sementara bagi pasangan yang subur, mengajak mereka untuk ikut serta dalam program KB.

"Kami rapat Jumat lalu, saya pimpin rapat terkait pelayanan kegiatan dan ini menjadi fokus kita untuk menggalakkan dengan program Toko Kencana," lanjutnya.

Meski Arianto tidak menampik, selain meningkatkan pelayanan dan edukasi program KB untuk masyarakat, juga meningkatkan kesadaran betapa pentingnya program KB.

"Kendalanya tidak hanya menyiapkan pelayanan, juga meningkatkan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya program KB," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Hasil Musrenbang, Infrastruktur Jalan Masih Jadi Prioritas di Kecamatan Kota Bangun Darat

TENGGARONG - Pembangunan infrastruktur, masih jadi fokus sejumlah kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar), salah satunya Kecamatan Kota Bangun Darat. Kecamatan termuda, hasil pemekaran Kecamatan Kota Bangun. Untuk tahun 2024, dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), pembangunan infrastruktur berupa jalan jadi prioritas.

Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, secara umum jalan antar desa, jalan produksi untuk sektor pertanian, perkebunan banyak masuk dalam usulan musrenbang yang digelar belum lama ini. Usulan ini disampaikan mengingat potensi pertanian dalam arti luas di Kecamatan Kota Bangun Darat yang cukup besar.

“Karena mengingat potensi pertanian cukup (besar) signifikan. Irigasi jadi salah satu prioritasnya,” ungkap Camat Kota Bangun Darat, Julkifli.

Infrastruktur penghubung antar desa pun juga menjadi prioritas. Mengingat ada 10 desa yang berada di Kecamatan Kota Bangun Darat. Perlu akses yang mumpuni, terutama untuk menuju ke Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat. Memudahkan masyarakat untuk melakukan urusan administrasi kependudukan.

Karena sejauh ini, akses menuju kantor kecamatan yang terbilang terbatas. Ketika diguyur hujan dalam waktu cukup lama, tidak bisa dilalui. Sehingga masyarakat harus memutar jauh, dengan perbedaan waktu mencapai 1 jam.

Terutama masyarakat yang berada di Desa Wonosari.

“Harus keliling dengan beda waktu 1 jam, masyarakat kesulitan mau urusan administrasi, kecuali sangat urgen,” lanjut Julkifli.

Memang diketahui, pada tahun 2024 ini Kecamatan Kota Bangun Darat akan mendapatkan kucuran Rp 48-50 miliar. Untuk menghubungkan Desa Sukabumi tepatnya di depan jalan poros, hingga Desa Wonosari (Kota Bangun 7). Dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 48-50 miliar.

“Harapannya pembangunan sesuai target dan pelayanan ke masyarakat bisa maksimal,” tutup Julkifli. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Tahun Ini Kantor dan Jalan Kecamatan Kota Bangun Darat Dibangun

TENGGARONG - Pembangunan Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat, dipastikan akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Proses pembangunan yang seharusnya terlaksana pada 2023 lalu, akan mulai berproses pada awal Mei 2024 ini.

Dijelaskan Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, kantor kecamatan akan berdiri di atas lahan 2,7 hektare (ha), dari total lahan yang disiapkan mencapai 7,25 ha. 4 ha lebih sisanya akan diperuntukkan untuk membangun Polsek Kota Bangun Darat dan Koramil Kota Bangun Darat.

“Pembangunan kantor camat pada murni APBD Kukar, dengan estimasi alokasi miliar,” ujar Julkifli.

Direncanakan, pembangunan kantor kecamatan yang dibangun di Desa Kedang Ipil ini, akan berjalan selama 6 bulan kedepan. Ditargetkan rampung pada bulan November 2024, selanjutnya menjalani serah terima pada bulan Desember 2024.

“Bulan Desember penyerahan (ke pemerintah kecamatan) dan Januari 2025 sudah operasional,” lanjut Julkifli.

Tidak hanya infrastruktur bangunan kantor kecamatan saja. Julkifli pun menyebut akses jalan menuju ke kantor kecamatan yang baru pun sedang disebut. Dengan waktu pelaksanaan dan pengerjaan yang sama. Yakni pada awal Mei 2024. Harapannya rampung bersamaan dengan infrastruktur fisik kantornya.

Yakni pembangunan jalan dari Desa Sukabumi tepatnya di depan jalan poros, hingga Desa Wonosari (Kota Bangun 7). Dengan total anggaran yang dikucurkan



ISTIMEWA

Camat Kota Bangun Darat, Julkifli

mencapai Rp 48-50 miliar. “Harapannya pembangunan sesuai target dan pelayanan ke masyarakat bisa maksimal,” tutup Julkifli. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



DISKOMINFO KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Silaturahmi PGRI Sepaku, Pj Bupati PPU Ingatkan Pentingnya Peran Guru dalam Peningkatan SDM

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kecamatan Sepaku di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Senin(22/4/2024). Dalam kesempatan itu ia menyampaikan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah atau negara.

Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu misi pembangunan PPU. Sebab SDM yang berkualitas merupakan salah satu modal utama keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan diberbagai bidang.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk bersilaturahmi. Tetapi juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam upaya memajukan pembangunan bidang pendidikan di Bumi Benuo Taka," katanya.

Untuk mewujudkan itu, sambungnya, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Makmur menyebut saat masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dan diselesaikan.

Di satu sisi, keberhasilan pembangunan bidang pendidikan harus mendapat dukungan dari semua elemen yang ada di daerah ini. Baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, termasuk organisasi profesi seperti PGRI.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia PPU harus benar-benar dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peran guru sangat penting dalam misi ini," jelas Makmur.

Kemudian PGRI sebagai organisasi profesi bertugas membina serta mengembangkan sikap, perilaku,



PROKOPIM PPU FOR MKN

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kecamatan Sepaku di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Senin(22/4/2024).

dan keahlian para guru anggota PGRI khususnya. Agar mampu melakukan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Guru bermutu dan bertanggung jawab sebagai anggota inti organisasi profesi PGRI, merupakan pilar utama untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang pada gilirannya hasil dari didikannya menjadi tulang punggung pembangunan.

"Peran guru sangat penting dalam membelajarkan siswa-siswinya. Artinya bahwa bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan

tetap diperlukan," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Makmur juga mengimbau para guru di PPU untuk senantiasa menjaga sikap dan perilaku. Karena selain sebagai pendidik, guru merupakan orang yang menjadi panutan dan contoh bagi murid-muridnya.

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh guru di Kabupaten PPU khusus yang berada di kecamatan Sepaku yang telah berkontribusi besar bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah kita ini," tutupnya. (ADV/Prokopim PPU/SBK)



Silaturahmi yang dilakukan Persatuan Guru Honorer Kota Samarinda dengan Walikota Samarinda Andi Harun.

Persatuan Guru Honorer Kota Samarinda Bersilaturahmi dengan Wali Kota

SAMARINDA - Persatuan Guru Honorer Kota Samarinda melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada Senin, (22/4/2024), di ruang rapat lantai 1 gedung Balaikota Samarinda.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Samarinda menyampaikan selamat kepada tenaga guru honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada akhir tahun 2023, sebanyak 782 guru honorer telah diangkat menjadi PPPK.

Andi Harun juga mengapresiasi kehadiran perwakilan Persatuan Guru Honorer Kota Samarinda. Langkah ini dianggap sangat tepat karena memungkinkan komunikasi langsung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pertanyaan tentang kepastian status dan tugas yang akan

dilaksanakan dapat diajukan secara langsung kepada pihak yang memiliki pemahaman yang jelas mengenai persoalan ini.

"Menjadi PPPK berarti menjadi bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Para guru honorer yang telah diangkat sebagai PPPK akan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti ASN. Selain itu, mereka berhak menerima gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)," jelasnya Andi Harun

"Oleh karena itu, para PPPK harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menjaga kedisiplinan, dan memberikan contoh yang baik sebagai aparatur negara," lanjutnya.

Terkait dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK yang belum diterima, Andi Harun menjelas-

kan bahwa proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) masih berlangsung. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kepastian hak. Sejak tanggal 1 April 2024, para tenaga guru honorer yang telah dinyatakan lulus sebagai PPPK tetap akan mendapatkan haknya (gaji dan TPP). Meskipun ada kemungkinan beberapa orang menerima SK setelah tanggal tersebut, hak dan kewajiban mereka berlaku sejak 1 April.

"Walaupun setelah 1 April SKnya diterima, katakanlah mungkin ada yang sampai menerima 1 Mei, katakanlah ini yang terbuku ya, atau 2 Mei atau setelahnya, cuma hak dan kewajibannya berlaku sejak 1 April," tandas Andi Harun. **(adv/diskominfosamarinda)**



Penyerahan sertifikat program Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional 2024.

Pemkab dan BPN Paser Bagikan 525 Sertifikat di Desa Rangan

PASER - Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional 2024 garapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI guna mempermudah kepengurusan sertifikat, kini hadir di Kabupaten Paser.

Kehadiran program itu mulai terealisasi, salah satunya di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Paser menyerahkan sebanyak 523 sertifikat yang akan diberikan secara bertahap.

"Melalui program ini, 523 sertifikat sudah selesai dengan realisasi 2023 secara keseluruhan sebanyak 5.661 bidang yang akan diserahkan secara bertahap," kata Bupati Paser, Fahmi Fadli, melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Paser, Romif Erwinadi, Senin (22/4/2024).

Selain program ini, dijelaskan Fah-

mi, Pemkab Paser dan Kantor BPN Kabupaten Paser turut menjalankan program lain, diantaranya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target 20 ribu bidang di 2024.

Selain itu, redistribusi tanah yang rencananya berada di Desa Lambakan, Desa Pasir Mayang dan Desa Pondong Baru. Penatausahaan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) di Desa Jone serta Hak Guna Usaha (HGU) PT Borneo Indo Subur yang akan dikelola sebagai reforma agraria.

"Yang patut kita apresiasi, program ini dapat mendorong pelaku UMKM untuk terlibat pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Fahmi mengingatkan masyarakat, agar segera mengurus tanah ke Kantor BPN Kabupaten Paser. Termasuk terhadap aparat pemerintah, agar

memberikan pelayanan prima, efektif dan efisien kepada masyarakat yang hendak mengurus administrasi pertanahan.

"Jangan takut atau malas untuk berurusan dengan pihak pertanahan," katanya.

Fahmi turut memberikan selamat kepada penerima sertifikat. Bukan hanya masyarakat, namun juga sertifikat hak milik rumah ibadah dan sertifikat hak pakai tanah pemerintah desa. Bagisnya, sejumlah upaya ini dilakukan guna mengurai konflik dimasyarakat.

"Semoga tidak ada lagi konflik atau sengketa tanah sehingga lingkungan menjadi aman, rukun dan damai," pungkasnya.

**Pewarta: Bhakti Sihombing
Editor: Nicha R**



Rapat paripurna DPRD Kabupaten Paser di Gedung Baling Seleloi

DPRD Sodorkan 9 Rekomendasi LKPj Bupati Paser 2023

PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyampaikan rekomendasi Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser 2023, melalui rapat paripurna di Gedung Baling Seleloi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, Senin (22/4/2024).

Hal itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser dengan menyodorkan sembilan rekomendasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Salah satunya, rendahnya Penerimaan Pajak Daerah pada 2023, yaitu hanya sebesar 68,77 persen. Dengan begitu, DPRD Kabupaten Paser, menekankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser untuk menyiapkan strategi peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

“Dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta

dalam pengelolaan maupun pemuangutan pajak daerah,” kata Anggota Banggar DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansyur.

Selain itu, memantau dan evaluasi secara rutin, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah, menetapkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta inovasi dengan melakukan kajian-kajian dalam rangka menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi peluang bagi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Selain itu, kurangnya petugas Penilai Pajak yang memiliki kemampuan untuk melakukan Penilaian (Appraisal) terhadap objek pajak pada Bapenda Kabupaten Paser. Sehingga DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Kabupaten Paser

untuk melakukan kerjasama.

“Kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltim, dalam rangka untuk membantu Bapenda dengan menempatkan petugas penilai pajak yang berkompeten,” katanya.

Terkait pemenuhan mandatory spending sebesar 20 persen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Paser agar proses perencanaan dan penganggaran.

“Khususnya untuk kegiatan fisik dapat sepenuhnya dialokasikan pada APBD murni, hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan demi menghindari SILPA yang besar pada Perubahan APBD, dikarenakan waktu pelaksanaan yang terbatas,” ungkapnya.

Terkait penerimaan Pajak Reklame, yaitu sekitar Rp 1 miliar lebih dan melebihi dari target yang ditetapkan, DPRD Kabupaten Paser memberikan apresiasi terkait capaian kinerja terse-

but, namun demikian pihaknya menganggap bahwa potensi penerimaan pajak reklame masih cukup besar.

Sehingga perlu menekankan kepada Pemkab Paser, untuk melaksanakan strategi, yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan terkait Pajak Reklame secara berkesinambungan, membangun sistem data yang akurat, serta memberikan reward dan punishment sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait masih belum tercapainya target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada 2023, realisasi hanya sebesar 1,38 persen dari target sebesar 2,32 persen. DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Paser untuk dapat mengambil langkah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi lainnya, dalam rangka proses percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Paser untuk melaku-

kan kolaborasi pembiayaan melalui Public Private Partnership (PPP).

“Sehingga memungkinkan pemerintah untuk menarik pendanaan dari sektor swasta, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Terkait RKPD sebagai Tematik Pembangunan Tahunan pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Paser agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang dipilih.

Sementara dalam mekanisme penyusunan dokumen LKPj, agar memperhatikan kesesuaian redaksional antara permasalahan dengan upaya mengatasi permasalahan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran sehingga adanya keseimbangan.

Ke depannya, dalam penyusunan dokumen LKPj, DPRD Kabupaten Paser agar memperhatikan urgensi disusunnya sebuah dokumen LKPj dan

tidak sekedar memenuhi tuntutan regulasi tetapi benar benar menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang sesungguhnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Paser, Fahmi Fadli, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Kabupaten Paser terhadap hasil pembahasan LKPj Bupati Paser 2023 dengan OPD terkait.

“Tentu setiap rekomendasi akan menjadi pertimbangan kami, ini akan kami bahas bersama OPD terkait, sehingga kedepannya bisa terwujud penyempurnaan LKPj,” ucap Fahmi Fadli.

Untuk diketahui, dalam penyampaian LKPj ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Fadly Imawan serta dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala OPD.

Pewarta: Bhakti Sihombing
Editor : Nicha R



LET'S GO BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digizoom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA*



Kode Promo
BTSOLI

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

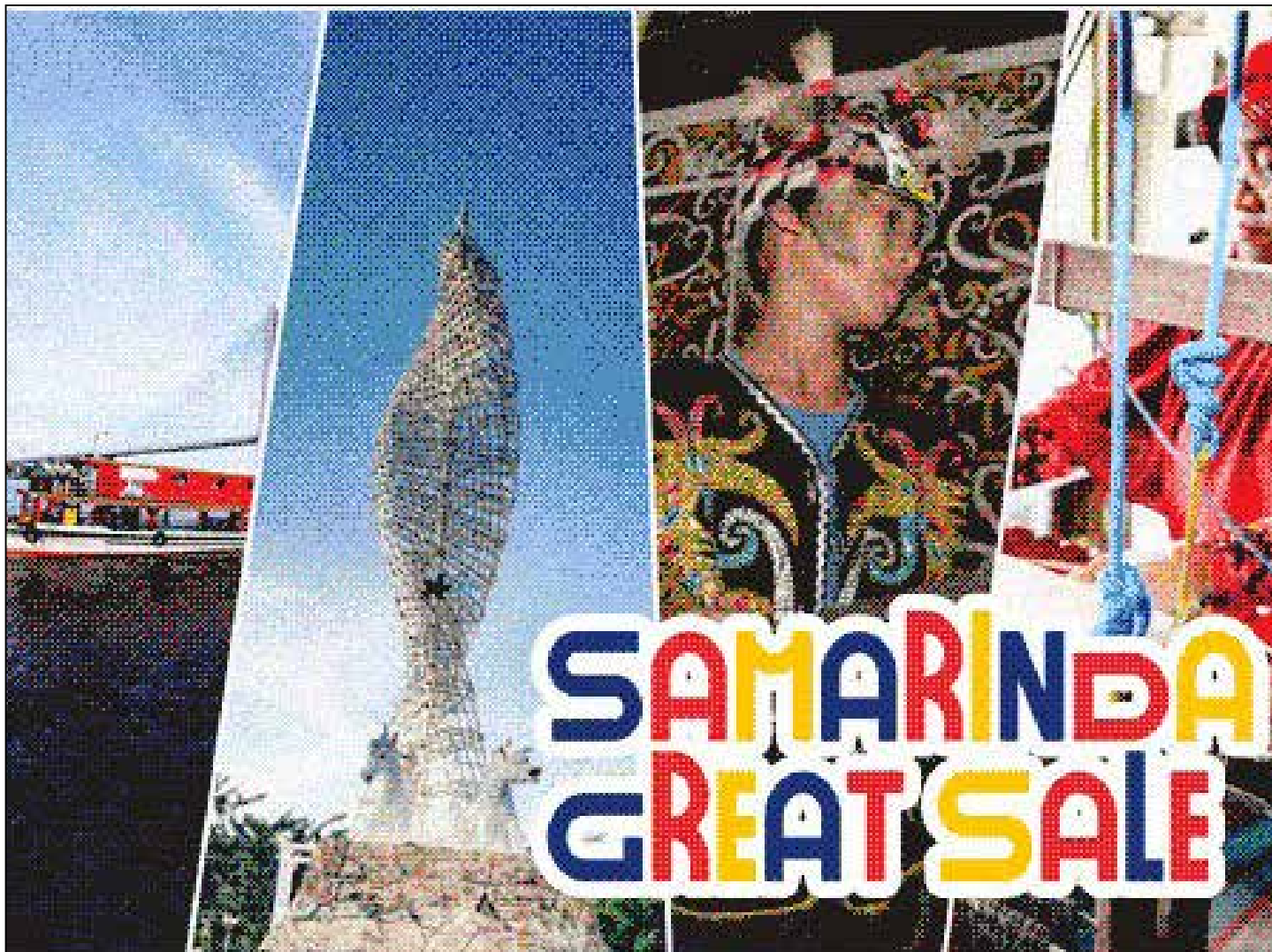
*Syarat dan ketentuan berlaku



Urusan Toyota lebih mudah!



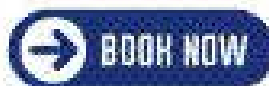
Bontang



Promo **Deluxe Room**

Rp **498.356**
nett/night

Include: Breakfast for 2 pax - Free up to 2 pcs Laundry
Free Afternoon Tea - Free Kopi Inspirasi (Buy 3 Pay 2)
Free Ice Cream



0811 581 3669
www.hotelgrandkartika.com



toko.radarmedia.id



Pers Rilis Pengungkapan Tindak Pidana Curanmor, di Kantor Polres Berau, Senin (22/4/2024).

Polres Berau Bersama Polres Bulungan Meringkus 3 Tersangka Pencurian Motor Sebanyak 21 Unit

TANJUNG REDEB – Satreskrim Polres Berau bersama Satreskrim Polres Bulungan berhasil meringkus 3 orang tersangka terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).

Dari pengungkapan kasus tersebut, sebanyak 21 unit kendaraan bermotor yang telah mereka dapatkan. Dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Berau dan Kabupaten Malinau.

Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo didampingi Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Ardian Rahayu Priatna mengatakan ini merupakan kasus pencurian lintas provinsi. keempat pelaku tindak pidana Curanmor ini diamankan di Jalan Pulau Panjang, Gg. Gubuhan, Kecamatan Tanjung Redeb.

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana curanmor di Jalan Pulau Panjang Gg. Bubuhan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,

Selasa (16/4/2024) lalu.

“Identitas pelaku yakni Asurddin, Edy Supianto, dan Hasrulla,” ungkapnya.

AKBP Steyven menjelaskan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut di berbagai lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara, seperti di Jalan Pemuda, Jalan Rambutan, Jalan Gunung Panjang, dan berbagai lokasi di Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Gunung Tabur serta Kabupaten Malinau.

Ketiga tersangka tersebut diamankan beserta sejumlah barang bukti. Termasuk 17 unit kendaraan bermotor dan beberapa peralatan yang mendukung tersangka melakukan aksinya.

“Tidak semua barang bukti diamankan di Polres Berau. 13 unit berada di Polres Berau dan 4 unit untuk Polres Bulungan,” tuturnya.

Dirinya menyampaikan kronologi kejadian penangkapan pelaku tindak

pidana Curanmor ini, penangkapan pertama dilakukan di wilayah hukum Polres Berau. Kemudian, pada tanggal (17/4/2024) lalu, Polres Berau melakukan pengembangan penyelidikan ke Kabupaten Malinau untuk mengambil barang bukti untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Kendati demikian, tiga tersangka tersebut terjerat Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara 9 tahun.

“Selain itu, Pasal 65 KUHP juga relevan dalam kasus ini, yang menyatakan bahwa dijatuhkan hanya satu pidana, ditambah sepertiga dari hukuman maksimum, dalam perbarengan beberapa perbuatan kejahatan,” tandasnya. (ril/dez)

Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan



ARIL/MEDKAL

Si jago merah yang melahap dua rumah dan satu mobil di Gang Rahayu, Jalan Durian III, Berau.

Dua Rumah dan Satu Mobil Terbakar di Gang Rahayu

TANJUNG REDEB-Kebakaran kembali terjadi di Jalan Durian III, Gg. Rahayu, Kelurahan Gunung Panjang, Tanjung Redeb, sekitar pukul 23.30 Wita, Senin, (22/4/2024).

Dalam upaya untuk memadamkan api yang mengamuk, Pemadam Kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, TNI/Polri, bersama warga sekitar turut bergotong royong dan membantu memadamkan api yang berkobar yang tak kunjung padam.

Selain itu, TNI/Polri dan warga sekitar turut membantu pemilik rumah yang berada disekitar area kebakaran untuk memindahkan hartabendanya yang masih bisa diselamatkan.

Dari pantauan awak Media Kaltim, untuk sementara diketahui dua rumah pribadi dan satu unit kendaraan roda empat hangus terbakar, adapun bangsalan delapan pintu mengalami kerusakan akibat kebakaran tersebut.

Sampai saat ini, penyebab terjadi-

nya kebakaran ini masih dalam tahap penyelidikan pihak terkait dan berapa kerugian yang ditaksir akibat peristiwa ini.

Upaya penanganan masih terus dilanjutkan untuk menenangkan api yang masih berkobar untuk meminimalisir kerugian yang dialami. **(ril/dez)**

Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan



Gunung Ruang Saat Meletus.

Paparan Gas SO₂ dari Gunung Ruang: Fakta dan Dampaknya ke Kaltim

BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Balikpapan belum menerima informasi mengenai paparan gas SO₂ (sulfur dioksida) di Kaltim setelah terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut).

Koordinator bidang data dan informasi BMKG Balikpapan, Diyan Novrida, menyatakan bahwa untuk memastikan apakah paparan gas SO₂ dapat mencapai Kaltim seperti yang disebutkan dalam informasi yang beredar, diperlukan data yang mendukung. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi tersebut.

"Dari sisi lain, BMKG Balikpapan tidak memiliki alat untuk mengukurnya, sehingga kami belum dapat memvalidasi informasi tersebut secara pasti. Begitu juga dengan hembusan abu vulkanik dari gunung yang meletus hebat pada Rabu lalu," ujarnya,

Senin (22/4/2024).

Lebih lanjut, Dyah menjelaskan bahwa informasi mengenai paparan gas SO₂ dari erupsi Gunung Ruang yang mencapai pulau Kalimantan telah tersebar luas di media sosial. Namun, BMKG memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada dampak yang terlihat di Kalimantan Timur, termasuk dalam hal penerbangan dan suhu udara.

"Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa gas SO₂ hampir menutupi sebagian besar wilayah di Pulau Kalimantan. Namun, saat ini penerbangan masih berjalan normal dan tidak ada dampak, kecuali untuk rute menuju Manado," jelasnya.

Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan aktivitas erupsi berupa lontaran abu vulkanik setinggi 3.000 meter dari kawah Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Erupsi terjadi pada Rabu

malam pukul 20.15 Wita. Letusan eksplosif tersebut menimbulkan fenomena alam kilatan petir vulkanik.

Pada tanggal 16 April 2024, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meningkatkan status Gunung Ruang dari Normal menjadi Waspada mulai pukul 10.00 Wita.

Pada pukul 16.00 WITA di tanggal yang sama, PVMBG kembali meningkatkan status dari Waspada menjadi Siaga berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik.

PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ruang untuk tetap waspada dan menghindari wilayah radius empat kilometer dari pusat kawah aktif gunung api bertipe strato tersebut.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S



Plt. Kepala Karantina Kaltim, Tasrif saat meninjau langsung pengiriman ekspor 324 kg Kerang Dara tujuan Singapura.

Permudah Eksportir, Karantina Kaltim dan Instansi Terkait Resmikan TPFT di Bandara SAMS

BALIKPAPAN – Karantina Kalimantan Timur bersama entitas Bandara Internasional SAMS Sepinggan Balikpapan melakukan soft launching Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) sebagai bagian dari Implementasi NLE (National Logistic Ecosystem) atau Ekosistem Logistik Nasional, pada Senin (22/4/2024).

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan, Endah Purnamasari mengatakan, NLE merupakan sebuah sistem reformasi dalam bidang logistik tanah air yang bertujuan untuk mendorong performa logistik dan meningkatkan iklim investasi. Implementasi NLE diharapkan dapat memperbaiki kinerja logistik nasional menjadi lebih cepat, terstruktur, sistematis dan biayanya dapat ditekan.

“Saya berharap setelah peresmian TPFT dan implementasi NLE ini, akan dilakukan sosialisasi baik itu dari Bea Cukai, Karantina, Angkasa Pura I, maupun AP Logistik kepada pengguna jasa karena mereka nantinya akan menanyakan mengenai sistem yang baru ini. Selain itu, ke depannya akan

diberlakukan Single Billing di Bandara Internasional SAMS,” ujarnya.

Sementara itu Plt. Kepala Karantina Kaltim, Tasrif mengatakan, rapor hijau Stranas PK yang saat ini dipegang oleh Pelabuhan Balikpapan merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antar berbagai instansi di Balikpapan.

“Soft Launching TPFT di Bandara SAMS ini menjadi tonggak penting menuju pelayanan ekspor di Bandara SAMS yang efektif, efisien dan transparan. Saat ini sudah ada 2 pengguna jasa Karantina Kalimantan Timur yang sudah 100 persen menggunakan SSM Ekspor,” jelasnya.

Tasrif menambahkan, selama bulan Januari hingga Maret 2024 ada sebanyak 153 sertifikat yang dicetak melalui SSM Ekspor dengan komoditas Kerang Dara dengan total volume 177.349 kg tujuan Thailand dan Malaysia yang diekspor melalui Kargo Bandara SAMS.

“Pada acara ini juga dilakukan pelepasan ekspor 324 kg Kerang Dara tujuan Singapura milik eksportir CV. Tiga A. Sebelum diekspor, Kerang

Dara diperiksa secara fisik oleh Pejabat Karantina untuk memastikan komoditas bebas dari hama penyakit. Selain itu, diperiksa pula kelengkapan dokumen yang diperlukan,” jelasnya.

Setelah pemeriksaan dilakukan dan komoditas dinyatakan bebas dari hama penyakit, serta dokumen lengkap, Karantina Kalimantan Timur menyerahkan Sertifikat KI-D1 (Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Ekspor) kepada eksportir sebagai bukti telah lapor karantina yang diserahkan secara langsung oleh Plt. Kepala Karantina Kaltim, Tasrif.

Karantina Kaltim mengharapkan ke depannya dengan diresmikannya TPFT ini, akan semakin mempermudah eksportir melalui simplifikasi dan efisiensi sehingga semakin bertambah pengajuan ekspor melalui SSM Ekspor baik dari segi volume, keberagaman komoditas, maupun dari segi jumlah pengguna jasa.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R



Sejumlah pekerja wanita dan istri pekerja KPB mengikuti Beauty Class x Make Over.

Super Beauty is You, Cantik Maksimal ala Kartini KPB

BALIKPAPAN - Dalam rangka memperingati Hari Kartini, PT Kilang Pertamina Balikpapan (PT KPB) menggelar acara Beauty Class x Make Over dengan tema "Super Beauty is You" di selasar gedung New Site Office (NSO) PT KPB pada Senin (22/4/2024).

Corporate Secretary PT KPB, Asep Sulaeman mengatakan, kegiatan yang juga merupakan rangkaian perayaan usia ke-5 tahun PT KPB ini berkolaborasi dengan brand kosmetik ternama dalam negeri, Make Over, dan dihadiri oleh sekitar 90 pekerja perempuan PT KPB serta perwakilan istri pekerja.

"Selama sekitar 2 jam, peserta dengan antusias mengikuti beauty class dan mendapatkan tips serta trik dari Make Up Artist (MUA) berpengalaman. Mereka juga berkesempatan untuk praktek langsung menggunakan make up sesuai dengan karakter wajah masing-masing, yang dapat digunakan sehari-hari untuk tampil cantik dan fresh sepanjang hari, tanpa terlihat berlebihan," ujarnya.

Lebih lanjut Asep menjelaskan, selama sesi berlangsung suasana penuh semangat dan antusias meras di seluruh ruangan. Peserta dengan antusias mengikuti setiap langkah yang diajarkan, peserta juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada instruktur dan berbagi pengalaman dengan sesama rekan kerja. Aura keceriaan dan kegembiraan terpancar dari wajah-wajah para peserta, menambah warna ceria dalam perayaan Hari Kartini kali ini.

"Dalam momen peringatan Hari Kartini ini, kami di PT Kilang Pertamina Balikpapan ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh Perwira Perempuan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjaga keluarga serta berperan aktif dalam penyelesaian proyek," jelasnya.

Melalui Beauty Class ini, pihaknya berharap dapat memberikan dukungan lebih lanjut kepada para perempuan di perusahaan untuk tetap tampil profesional dan percaya diri dalam menjalani berbagai peran, baik di tempat kerja maupun di rumah.

"Selain memberikan keterampilan positif dalam tata rias, kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk internal engagement dalam membangun budaya perusahaan, sehingga ekosistem lingkungan kerja menjadi positif dan menyenangkan," tutup Asep Sulaeman.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R





DWI/RADARBONTANG

Bajuri beserta rombongan dari Partai Demokrat saat mendaftar di kantor PKB.

Serius Maju Bacalon Wawali Bontang, Bajuri Daftar di Tiga Parpol

BONTANG-Mantan Bhabinkamtibmas Kelurahan Loktuan, Ahmad Bajuri menyatakan siap maju sebagai bacalon wali kota Bontang pada pilkada 2024 mendatang. Keseriusannya itu ditunjukkan dengan mendaftar di 3 partai politik.

Bajuri menjelaskan, keinginannya untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Bontang adalah salah satunya, ingin membangun Kota Bontang lebih maju lagi dan juga lebih sukses ke depan. Bahkan visi dan misi yang berkelanjutan akan disampaikan nantinya pas harinya tiba.

"Semuanya telah kami persiapkan dengan matang, nanti akan saya sampaikan visi misi berkelanjutan jika harinya sudah tiba," ucapnya saat ditemui awak media, Senin (22/4/2024).

Sebelumnya, Bajuri menjelaskan bahwa dirinya telah lama mengabdikan diri di kepolisian. Secara otomatis pengabdian ini tidak ingin terputus begitu saja, sehingga ada berkelanjutan yang optimal dan secara global.

"Jangan sampai pengabdian yang pernah saya lakukan terputus begitu saja," paparnya.

Bajuri berharap nantinya di Pilkada 2024 ini berjalan dengan aman,

sukses, dan semuanya juga dalam keadaan damai. Tidak ada permasalahan sekecil apapun, dalam artian Pilkada dapat berjalan dengan baik.

"Poin yang paling penting ialah ingin membangun Kota Bontang dengan harapan bersama, insyaallah berjalan dengan lancar. Tetap optimistis dan usaha, selebihnya biar yang di atas yang menentukan," ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa Bajuri telah menjadi kader Partai Demokrat sebelum masa Pemilu Legislatif (Pileg) hingga saat ini. Hal itu diungkapkan Sumardi selaku Tim Penjaring Partai Demokrat.

Diketahui pula, Bajuri telah mendaftar di tiga partai politik, meliputi Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, serta Partai Golongan Karya (Golkar).

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PKB Bontang, Firman Nawawi mengatakan, jika partainya masih membuka secara lebar untuk pendaftaran bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang.

"Kami masih membuka peluang, siapa saja boleh bergabung di PKB, dan pendaftaran ini berlaku hingga 25 April 2024. Bahkan pendaftaran bisa melalui website, sehingga kami akan proseskan ke DPP langsung," tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam





Diduga Selewengkan BBM Subsidi, Polisi Amankan Warga Bontang Lestari

BONTANG – Polres Bontang melalui unit II Tipidter Satreskrim Polres Bontang mengamankan seorang laki-laki inisial P yang diduga menyelewengkan BBM bersubsidi.

Pelaku P diamankan pada Sabtu (20/4/2024) pukul 23.00 Wita di Jalan Urip Sumoharjo RT 12 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Kapolres Bontang AKBP Alex F.L Tobing melalui Kasat Reskrim Polres Bontang, Iptu Hari Supranoto menjelaskan saat anggota unit II Tipidter Satreskrim Poles Bontang sedang melaksanakan patroli, tim kemudian mencurigai satu unit kendaraan roda empat yang melakukan pengisian BBM dari SPBU KM 8 sebanyak tiga kali pengisian dalam sehari. Setelah itu anggota unit II Tipidter melakukan pembuntutan terhadap mobil tersebut sampai di jalan Urip Sumoharjo Bontang Lestari.

“Anggota tim memberhentikan mobil dan didapatkan terduga pelaku membawa 8 buah jeriken kapasitas 20 liter yang dicurigai berisi BBM jenis Pertalite,” ungkapnya.

Selanjutnya, Hari mengatakan atas temuan itu, tim kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti ke Polres Bontang untuk dimintai keterangan dan penyidikan.

“Mengamankan pelaku dan barang bukti ke Poles Bontang berupa tiga buah jeriken berkapasitas lima liter berisipertalite dan sembilan buah jeriken berkapasitas 20 liter berisi Pertalite dan barang bukti lainnya,” terangnya.

Lanjut Hari, terduga pelaku disangkakan pasal 55 undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah ketentuannya

pada pasal 40 angka 9 undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. “Terduga dikenakan undang-undang Migas,” jelasnya.

**Penulis: Yahya Y
Editor: Nicha R**





DWI/RADARBONTANG

Irfan bersama tim kembalikan formulir bacalon wawali Kota Bontang menggunakan angkot.

Tampil Beda, Irfan Kembalikan Formulir Bacalon Wawali Bontang Naik Angkot

BONTANG - Anggota DPRD Bontang, Muhammad Irfan mengembalikan formulir di Sekretariat Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Bontang, di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Uniknya, Irfan datang bersama para rombongan menggunakan transportasi Angkutan Kota (Angkot), yang dimana diiringi sebanyak 50 angkot se-Kota Bontang.

Irfan menjelaskan, tidak pernah menyangka jika partisipasi dari komunitas angkot di Bontang akan mengantarkan dirinya, bahkan menemani mengantarkan pendaftaran untuk maju di Pilkada 2024.

"Alhamdulillah, saya tidak pernah menyangka ada kejutan dari komunitas angkot yang bersedia mengantarkan kami untuk mempersembahkan diri maju sebagai calon Wakil Wali Kota," ucapnya saat diwawancarai, Senin (22/4/2024).

Dirinya menyatakan, jika komunitas angkot sendirilah yang menawarkan untuk mengantar serta

mendampingi, bahkan dari pihaknya pun tidak ada meminta, jadi ini juga adalah bukti rasa simpati komunitas angkot terhadap tim.

"Dengan di sini banyaknya angkot, ini adalah salah satu bukti bahwa kita peduli terhadap kaum menengah ke bawah. Bahwa angkot adalah transportasi sejuta umat. Perlakuan itu membuat saya terharu," paparnya.

Irfan berharap nantinya saat pergantian wali kota dan wakil wali kota ada perubahan yang lebih baik lagi daripada yang sekarang, ataupun dari yang

kemarin-kemarin. Bukan berarti yang lalu itu tidak baik, akan tapi minimal ada yang lebih baik lagi nantinya.

"Dan juga minimal membawa harapan baru, ada wajah baru yang ikut di dalam Pilkada untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang mendatang. Sehingga dengan harapan bisa saling bersinergi dari Partai Golkar dan PDIP yang mana menurut masing penilaian yang terbaik," tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Sebanyak 53 Peserta Ikuti Pelatihan Dasar Satuan Pengamanan Gelaraan PT KOG bersama APSI dan Polres Kubar

KUTAI BARAT – PT Kubar Outsource Global (KOG) bekerja sama dengan pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Profesi Satpam (APSI) dan Polres Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melaksanakan pelatihan pendidikan dasar satuan pengamanan (Satpam) tingkat gada pratama angkatan ke-22 dan gada madya angkatan ke-5 tahun 2024. Kegiatan ini digelar di gedung serba guna Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok, Senin (22/4/2024).

Dengan diikuti sejumlah 53 peserta, kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakapolres Kubar Kompol Ahmad Abdullah ini, akan berlangsung selama 14 hari, yakni 22 April - 5 Mei 2024 mendatang.

Di dalam sambutannya, Wakapolres Kubar Kompol Ahmad Abdullah mengatakan, pelatihan satpam ini sangat penting karena para siswa satpam dibekali dengan materi teori maupun praktek untuk perusahaan dan instansi dia bekerja.

Menurutnya, teori maupun praktek

yang disampaikan dalam pelatihan ini sangat penting, guna menentukan tindakan pertama di tempat kerja. Terutama apabila terjadi gangguan Kamtibmas atau pelanggaran hukum di wilayah tugasnya.

“Tentu satpam ini harus bisa mengambil tindakan, menjalin komunikasi dan koordinasi jika terjadi tindak pidana dan sebagainya,” jelas Wakapolres.

Sebab itu, sebelum terjun kelapangan kerja, para Satpam ini harus diberikan pembekalan (keterampilan teknis yang diperlukan untuk suatu pekerjaan), baik itu teori maupun praktek.

“Untuk yang belum tahu menjadi tahu. Tentu itu menjadi nilai plus bagi satpam yang mengikuti pelatihan ini. Apalagi mereka juga diberikan hard skill kemampuan bela diri. Baik, bela diri tangan kosong maupun menggunakan borgol dan tongkat. Artinya sebagai alat keamanan perusahaan satpam harus mempunyai kualifikasi dan kemampuan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama

PT.Kubar Outsource Global, Markus Dino menyebutkan, tujuan perusahaan melakukan Pelatihan Diksar ini adalah untuk menghasilkan tenaga satuan pengamanan yang memiliki sikap mental kepribadian, kesempataan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan.

“Melalui pelatihan ini diharapkan menghasilkan tenaga Satpam yang tangguh. Siapa pun di dunia industri serta organisasi swasta dan pemerintah. Untuk tenaga Satpam lulusan PT KOG mampu bersaing pada bursa ketenagakerjaan di Indonesia,” ucapnya.

Menurut Dino, banyak perusahaan baik instansi di Kubar yang memerlukan satpam, tentu melewati prosedur dan salah satunya pelatihan pendidikan dasar satpam.

“Bersedia akomodir untuk menerima siswa satpam baik di tingkat gada Pratama maupun gada Madya,” pungkas Dino.

**Pewarta: Ichal
Editor: Nicha R**





ISTIMEWA

Kebakaran bangunan kosong di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan.

Hampir Bersamaan, Terjadi Kebakaran di 2 Lokasi di Kukar

TENGGARONG - Musibah kebakaran terjadi hampir bersamaan di dua lokasi berbeda di Kutai Kartanegara (Kukar). Yakni kebakaran rumah kosong di Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Kota Bangun, pada Senin (22/4/2024).

Di Kecamatan Kota Bangun, kebakaran terjadi di kawasan padat RT 1 dan RT 2 Desa Liang Ilir. Sebanyak 8 rumah habis dilalap si jago merah, sekitar pukul 10.00 Wita hingga menyebabkan 8 Kepala Keluarga (KK) dan 30 jiwa harus kehilangan

tempat tinggalnya.

"Terjadi sekitar jam 10.00, (penyebab awal) korsleting listrik pak," ujar Kades Liang Ilir, Rodiani, melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (22/4/2024).

Kebakaran hebat pun menyebabkan 9 rumah lainnya ikut terdampak. Yang berisikan 11 KK dan 26 jiwa. "(Kendala) karena kawasan padat penduduk," tutup Rodiani.

Sementara musibah kebakaran lainnya terjadi di Kecamatan Loa Janan yang menghancurkan sebuah

bangunan kosong. Tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku RT 1 Desa Loa Duri Ilir, sekitar pukul 09.00 Wita. Penyebab sementara pun sama, yakni diduga karena adanya arus pendek listrik dari rumah Abjuansyah.

Sebanyak 6 unit mobil damkar diturunkan, sehingga butuh waktu 40 menit api berhasil dijinakkan. Akibat, kerugian ditaksir mencapai Rp 150 juta.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha R





Siap Jadi Agrowisata, Sangatta Selatan Panen Benih Padi Sawah 4,8 Ton

SANGATTA - Momen monumental terjadi di Kutai Timur (Kutim) di Desa Sangatta Selatan, dimana panen benih padi sawah mencapai 4,8 ton pada Senin (22/4/2024) pagi, merupakan sebuah pencapaian gemilang dalam sektor pertanian.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman turut serta dalam proses panen di lahan milik Kelompok Tani (Poktan) Umbut Aren dan memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para petani dan pihak lain yang telah mendukung kemajuan pertanian di daerah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengucapkan selamat kepada Poktan Umbut Aren atas keberhasilan panen mereka, yang meningkat dari 3 ton menjadi 4,8 ton. Hadir dalam acara tersebut juga Ketua DPRD Kutim Joni, Ketua TP-PKK Kutim Siti Robiah, Dandim 0909/KTM Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo, Camat San-

gatta Selatan Abbas, Lukas Tri Wandoyo dari manajemen Pertamina EP Sangatta, Kepala Balai P2 Sangatta Selatan Solehuddin, dan para undangan lainnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa hasil panen ini akan dijadikan benih padi untuk musim tanam berikutnya.

"Saya menekankan pentingnya kemandirian petani dalam penyediaan benih, sambil mendorong pengembangan sawah sebagai objek wisata pertanian, sebagaimana yang telah dilakukan di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun," jelasnya.

Bupati Ardiansyah juga berharap agar pihak Pertamina, yang beroperasi di wilayah Sangatta Selatan, dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pertanian.

"Khususnya dalam memajukan potensi agrowisata di lahan Poktan Umbut Aren," bebernya.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutim, Dyah Rat-

naningrum, menegaskan pentingnya Kutim memproduksi benih padi sendiri tanpa perlu bergantung pada pasokan dari pusat.

"Pemerintah juga turut serta dalam penyediaan pupuk bagi petani, yang berkontribusi dalam peningkatan hasil panen seperti yang dialami oleh Poktan Umbut Aren," sebutnya.

Ditambahkan Dyah, dukungan pupuk yang memadai, menurutnya, adalah bukti bahwa kerja keras dan sinergi antara pemerintah dan petani.

"Golnya dapat menghasilkan prestasi gemilang dalam sektor pertanian," urainya.

Untuk diketahui, panen benih padi sawah sebanyak 4,8 ton di lahan Poktan Umbut Aren bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga tonggak sejarah dalam mengangkat potensi pertanian. Ini juga memperkuat Kutim sebagai salah satu pusat pertanian terdepan di masa depan dan sebagai bagian integral dari pariwisata lokal. (Rkt)



Arfan, Orang Keempat yang Daftar Bacalon Bupati dan Wabup Partai Demokrat

SANGATTA - Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Arfan, mendaftarkan diri sebagai bakal calon (bacalon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) di Partai Demokrat. Hal ini terlihat, saat Arfan beserta tim suksesnya mendatangi Sekretariat DPC Partai Demokrat Kutim di Jalan P Diponegoro, Senin (22/4/2024) yang diterima langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kutim Ordiansyah. Jalannya kegiatan berjalan penuh keakraban.

Dalam acara tersebut, Arfan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kader dan politikus Partai Demokrat yang telah menyambutnya dengan hangat, serta mengapresiasi kedatangan anggota Partai NasDem dalam acara Demokrat.

"Yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir, rekan-rekan saya yang sudah luar biasa membawa NasDem hadir hari ini di Demokrat. Terima kasih kepada Demokrat sudah menyambut kami dengan baik," sebutnya.

"Saya tidak pernah ngomong di

grup ini mau daftar. Tadi malam saya coba kirim. Alhamdulillah responnya bagus," sambung Wakil Ketua II DPRD Kutim itu.

Dengan santai, Arfan turut menjelaskan bahwa untuk mendaftar di DPRD, seseorang harus melalui tahapan calon legislatif (caleg), hal yang sama berlaku bagi yang ingin menjadi pimpinan daerah.

Arfan menegaskan bahwa kedatangannya di Kutim didasari oleh tekad kuat dan niat baik untuk membangun wilayah tersebut, serta telah menjalin komunikasi yang baik dengan Partai Demokrat.

Dia juga mengakui bahwa awalnya tidak memiliki niat untuk terlibat dalam politik saat hijrah ke Kaltim, namun menganggap perjalanan hidup manusia sulit diprediksi, dan saat ini terus berusaha menjadi manusia yang bermanfaat.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kutim Ordiansyah mengungkapkan bahwa saat ini telah ada empat figur publik yang telah mengambil formulir untuk menjadi

bakal calon bupati dan wakil bupati, yaitu Ketua DPC PDI Perjuangan Agiel Suwarno, Ketua DPC PKB Kutim Sobirin Bagus, politikus PPP Hepnie Armansyah, dan Ketua DPD Partai NasDem Kutim Arfan.

Masa pendaftaran penjangkaran bakal calon tersebut ditutup hingga 30 April 2024, sementara pihaknya masih menunggu figur publik lainnya untuk mendaftar. Selain itu, Ordiansyah juga menyebut bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Ardiansyah Sulaiman dan PKS melalui silaturahmi, terutama saat bulan Ramadan.

Ordiansyah juga menyampaikan bahwa Partai Demokrat tidak akan menyebutkan jumlah ongkos politik yang disiapkan untuk menghadapi kontestasi Pilkada Kutai Timur.

"Ongkos politik merupakan bagian dari strategi, dan mereka di Partai Demokrat menegaskan anti-money politics, dengan fokus membangun simpul di masyarakat," singkatnya. (Rkt)



Pemkab Kutim Halal Bihalal Bersama Guru se-Sangatta

SANGATTA-Masih dalam suasana syawal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggelar acara Halal Bihalal Idulfitri 1445 H bersama seluruh guru se-Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan di area pelataran indoor Masjid Agung Al Faruq Bukit Pelangi, Senin (22/4/2024). Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wabup Kutim Kasmidi Bulang, Kepala Disdikbud Kutim Mulyono dan seluruh undangan guru di Kutim yang hadir.

Halal Bihalal ini dilaksanakan ba'da zuhur. Dihadiri kurang lebih sekitar

2.200 guru muslim dan non muslim dengan mengusung tema "Raih Kemenangann dengan Mensucikan Hati, Memperkuat Silaturahmi dan Saling Memaafkan".

Kegiatan dimulai dengan tausiah dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Ia pun mengajak seluruh guru memaknai halal bihalal dalam kehidupan sehari-hari. Saling memaafkan satu sama lain.

"Yang lebih utama, memaafkan kesalahan manusia. Maka jangan menunggu orang minta maaf. Allah memerintahkan untuk saling memaafkan. Seperti makna Idulfitri sebagai ulama mengartikan kembali

fitri, jadi manusia tanpa dosa," sebut Ardiansyah.

Pada kesempatan itu juga, ia menjelaskan berkenaan ibadah setelah bulan Ramadan serta fadilahnya dalam kehidupan sehari-hari.

"Barang siapa puasa Ramadan dan puasa Syawal 6 hari. Fadilahnya sama dengan puasa 1 tahun penuh. Dilaksanakannya bisa langsung 6 hari berturut turut atau boleh juga berselang-seling," bebernya.

Kegiatan ini pun ditutup dengan salam-salaman jajaran Pemkab Kutim bersama seluruh guru yang hadir.

(Rkt)



radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarballkpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982

Bangga Kencana dan Penurunan Stunting, Kutim Didukung DAK BOKB BKKBN RI Rp 5,1 Miliar

SAMARINDA - Pada Senin (24/4/2024) pagi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim menggelar Forum Koordinasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kaltim Tahun 2024 di Room Crystal 1 Hotel Mercure.

Acara dibuka oleh Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia, Tavip Agus Rayanto, dengan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Bupati dan Wali Kota se-Kaltim, serta sejumlah pejabat termasuk Kepala DPPKB Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian dan Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor yang mewakili Wabup Kutim Kasmidi Bulang.

Selain membahas strategi penurunan stunting, acara tersebut juga mencakup penyerahan simbolis alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Kesejahteraan Bersama (BOKB) TA 2024 oleh Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra kerja.

Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan hasil rapat



kerja Forum Koordinasi tersebut.

"Tentunya Kutim siap mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program penurunan stunting dan Bangga Kencana, serta menyasar kegiatan penurunan stunting dan kemiskinan dalam APBD Kutim," tegasnya.

Lebih lanjut, Noviari Noor menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memperhatikan proses di lapangan dan meningkatkan kunjungan keposyandu untuk memperoleh data

yang akurat.

"Langkah berikutnya adalah melakukan penanganan terhadap keluarga yang terindikasi mengalami stunting dengan kolaborasi antarinstansi terkait," urainya.

Kutim menerima alokasi DAK dan BOKB TA 2024 sebesar Rp 5,1 miliar dari BKKBN RI, menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rkt)





Kutim Dukung Penuh Gerakan Sinergi Reforma Agraria

SANGATTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional di Kabupaten Suka Bumi, Jawa Barat, dengan kehadiran virtual Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono yang mewakili Bupati Kutim di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim, Senin (22/4/2024). Hadir juga Kepala Kantor Pertanahan Kutim Murad Abdullah, perwakilan Camat Sangatta Selatan, perwakilan Kelurahan Teluk Lingga, dan perwakilan penerima sertifikat tanah.

Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria Dalu Agung Darmawan bersama Kantor Pertanahan seluruh Indonesia mendeklarasikan komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita Reforma Agraria guna mengurangi ketimpangan pemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tujuan dari gerakan ini adalah mensinkronkan kegiatan penataan aset dan akses, serta mendorong potensi usaha penataan akses di seluruh kabupaten/kota," sebutnya.

Sementara itu, Asisten Pemkesra Seskab Kutim, Poniso Suryo Renggono, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program reforma agraria sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pentingnya bagaimana menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerin-

tah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program-program reforma agraria yang berkelanjutan," tegasnya.

Senada, Kepala Kantor Pertanahan Kutim, Murad Abdullah, menjelaskan bahwa reforma agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Di Kutim, telah dilakukan penataan aset melalui redistribusi tanah dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," urainya.

Selain itu, reforma agraria di Kutim juga melibatkan pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, sep-

erti pendampingan pendaftaran NIB, pemberian bantuan modal usaha, dan pelatihan manajemen keuangan.

"Harapannya, gerakan sinergi reforma agraria nasional dapat mendorong pemerintah daerah dan kantor pertanahan untuk bersama-sama aktif dan berkolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Acara ditutup dengan penyerahan simbolis sertifikat tanah kepada perwakilan warga oleh Asisten Pemkesra Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono dan Kepala Kantor Pertanahan Kutim Murad Abdullah, diikuti dengan sesi foto bersama. **(Rkt)**





DOK-ISTIMEWA

Wakil Ketua I bersama Komisi I-II DPRD Mahulu saat berdialog dengan sejumlah 109 buruh sawit di depan gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim pada Jumat,(19/4/2024).

Buntut Pengusiran 109 Buruh Sawit oleh PT CPP, Komisi I dan II DPRD Mahulu Temui Disnakertrans Kaltim

MAHAKAM ULU – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Tiopilus Hanye bersama dengan Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rozani Erawadi melakukan dialog dengan para demonstran dari pekerja PT. Citra Palma Pertiwi (CPP), di depan gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Kaltim, Jumat (19/4/2024) lalu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye beserta Komisi I dan II DPRD Mahulu bertemu langsung dengan jajaran Disnakertrans Kaltim guna mengungkapkan prihatin dengan permasalahan dan akan menindaklanjuti secara bertahap terkait pengusiran buruh perkebunan kelapa sawit secara paksa.

“Kami dari DPRD akan menjadwalkan

secara bertahap, dengan memanggil pihak perusahaan, pihak buruh ataupun pemanggilan kedua belah pihak secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini agar cepat selesai,” ujar Tiopilus Hanye kepada wartawan Senin,(22/4/2024).

Diketahui, sejumlah 109 buruh perkebunan kelapa sawit mengaku diusir secara paksa oleh pihak manajemen PT CPP, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Mahulu, pada tanggal 5 Maret 2024 lalu.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kaltim, Silvester Hengki Sanan mengatakan, pihak perusahaan seharusnya mengambil langkah bijak untuk memenuhi hak dan kewajiban perusahaan kepada karyawan.

“Seharusnya jangan melakukan

pengusiran secara paksa seperti itu,”ungkapnya..

Sementara itu, Koordinator Pengurus Serikat Perusahaan (PSP), Damianus Sion mengatakan bahwa, awal mula masalah tersebut muncul, dikarenakan perselisihan perhitungan dari hasil premi buah sawit.

“Artinya, perhitungan premi tidak sesuai dengan keringat karyawan,” ungkapnya.

Dijelaskannya bahwa, pihaknya sudah dua kali melakukan perundingan dengan pihak perusahaan, agar menyelesaikan masalah tersebut.

“Kemudian kami melakukan pemogokan kerja. Sehingga, pada akhirnya dari pihak perusahaan melakukan pengusiran secara paksa,”pungkasnya.

**Pewarta: Ichal
Editor :Nicha R**



Ketua DPRD Mahakam Ulu Novita Bulan

Novita Bulan Siap Bertarung di Pilkada Mahulu 2024 dengan Dukungan Lintas Sektor

SAMARINDA - Novita Bulan, Ketua DPRD Mahakam Ulu, secara resmi mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Mahulu dalam pemilihan yang akan datang pada tahun 2024.

Dengan dorongan kuat dari rekan-rekan separtai, masyarakat, dan berbagai fraksi, Bulan merasa yakin untuk mengambil langkah maju dalam arena politik lokal.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (22/4/2024), Bulan menyatakan, dorongan tersebut membulatkan niatnya untuk mengganti arah perjuangan politiknya, ke jalur eksekutif.

"Saya menerima dorongan dari berbagai pihak yang memberi saya keberanian untuk maju sebagai

calon eksekutif di Pilkada Mahulu," ungkapnya.

Pengalaman dua periode sebagai pemimpin legislatif di Mahulu, dianggapnya sebagai aset berharga untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kabupaten termuda di Kalimantan Timur.

Bulan, yang juga merupakan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Mahulu, menekankan keinginannya untuk memberikan lebih banyak kontribusi pada pembangunan daerah kelahirannya. "Keterbatasan kewenangan legislatif tidak menghalangi saya untuk berupaya memberikan yang terbaik bagi Mahulu," ujarnya.

Fokus utama Bulan adalah peningkatan infrastruktur, khususnya per-

baikan jalan, serta pengembangan program pembangunan yang berorientasi pada sektor perkebunan.

Meskipun belum menerima rekomendasi resmi dari DPC Partai Gerindra Mahulu, Bulan telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti semua tahapan pemilihan sesuai dengan aturan internal partai.

Dengan visi dan misi yang jelas, Novita Bulan berharap dapat membawa perubahan signifikan dan kemajuan bagi Kabupaten Mahulu, seiring dengan persiapannya menghadapi Pilkada Mahulu 2024.

**Penulis: Andi Desky
Editor: Nicha R**



Ridhawati Suryana

Ridhawati Suryana Kembalikan Formulir Pendaftaran ke Demokrat, Pertanda Siap Maju Pilkada 2024

PASER - Ridhawati Suryana, menjadi orang pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Paser 2024 ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Paser, Senin (22/4/2024).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser periode 2014-2019 sekaligus kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Paser itu datang ke Sekretariat DPC Partai Demokrat, bersama tim pemenangannya.

Ridhawati menyatakan, formulir pendaftaran yang dikembalikannya yakni untuk persyaratan Bakal Calon Bupati untuk dapat diusung oleh Partai Demokrat. Dikatakannya, jika semua persyaratan administrasi yang diperlukan telah lengkap.

"Kalau sudah mendaftar ya harus

optimis maju," kata Ridhawati.

Sejauh ini, telah ada beberapa figur yang melakukan komunikasi politik dengannya, khususnya sosok Bakal Calon Wakil Bupati, sebagai pendampingnya di Pilkada nanti. Hanya saja, Ridha belum mau menyebut secara gamblang.

"Ada pokoknya, terlalu prematur kalau bahas ini sekarang," sebut anak mantan Bupati Paser, mendiang Ridwan Suwidi itu.

Selain mengambil formulir pendaftaran di Partai Demokrat, dia juga telah mendaftar melalui Partai Golkar. "Jika ada partai lain lagi yang membuka pendaftaran penjurangan bakal calon bupati saya siap mendaftar," tegas Ridha.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Penjurangan DPC Partai Demokrat Kabupaten Paser, Suhada menuturkan sejak dibukanya pendaftaran 5 April 2024 lalu telah ada figur yang

mengambil formulir pendaftaran. Selain Ridha ada Muhammad Nasir yang merupakan kader Partai Demokrat.

"Baik kader maupun non kader untuk diusung Partai Demokrat peluangnya sama, tinggal elektabilitasnya saja," tutur Suhadak.

Adapun batas akhir pengambilan formulir di Partai Demokrat Paser 5 Mei 2024 nanti. Dibeberkannya, sejauh ini beberapa figur telah menjadwalkan untuk mengambil formulir pendaftaran penjurangan balon bupati maupun wakil bupati.

"Ada Hendrawan Putra (Politisi Partai Demokrat), kemudian Aji Muhammad Jarnawi (Ketua DPC Partai NasDem Paser) dan Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf," pungkas Suhadak.

Pewarta: Bhakti Sihombing
Editor: Nicha R



ROBBI/MKN

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat diwawancarai usai kegiatan buka puasa bersama insan pers PPU, Senin (8/4/2024) lalu.

Pj Bupati PPU Akui Banyak Partai Buka Komunikasi Soal Pilkada 2024

PENAJAM PASER UTARA-Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengungkapkan telah banyak partai politik (parpol) yang membuka komunikasi dengannya baru-baru ini. Berkaitan dengan diri yang digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) PPU 2024.

Meski tahapan Pilkada 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai mendatang, persiapan oleh penjarangan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati oleh berbagai parpol telah berjalan. Pembahasan terkait sosok yang akan memimpin daerah berjudul Benuo Taka ini pada periode 2024-2029 juga mulai hangat diperbincangkan.

Direktur Produk Hukum dari Ditjen Otda Kemendagri ini menegaskan bahwa dirinya sebagai aparatur sipil negara (ASN) masih fokus pada menjalankan tugas dari mandat yang diberikan saat ini.

"Saya menunggu arahan dari pimpinan dulu, Pak Presiden. Kan yang menugaskan saya ke sini (PPU) kan beliau. Ya saya tanya dulu, 'Pak setelah ini Saya mau Bapak ke manain,'" ucapnya saat ditanyai belum lama ini.

Ia mengakui juga saat ini memang banyak parpol yang menyatakan mi-

nat untuk mengusungnya menjadi balon bupati PPU. Walau begitu, ia tetap kukuh menunggu arah Presiden atas pekerjaan selanjutnya yang akan diberikan.

"Partai politik sudah banyak yang tanya ke saya. Dari Jakarta, dari mana-mana. 'Bapak saja langsung, top ces'. Itu kan kata kalian, kalau atasan saya belum tentu. Saya kan masih penugasan Pak Presiden, masih berlaku. Jadi saya tunggu dulu arahan Presiden," ungkap Makmur.

Dalam komunikasinya dengan beberapa parpol itu, bahkan ada yang sampai menyatakan akan berkomunikasi dengan Presiden untuk memintanya. "Apakah kami (parpol) langsung minta ke Presiden? Saya bilang silakan saja, tapi yang jelas jangan saya yang minta kepada beliau. Kalau saya minta nanti dianggapnya (lain). Disuruh benahi PPU dengan IKN, (kok) sekarang jadi ke mana," sambungnya.

Meski begitu, ia tak menampik bila dirinya ke depan bisa jadi bakal maju dalam kontestasi demokrasi di PPU kali ini. Walau ia tetap tak bisa memutuskan semuanya atas kehendaknya sendiri.

"Semua akan ada jalannya. Kalau saya bilang 'tidak menutup kemungk-

inan' mendahului Yang Maha Kuasa saya. Kalau memang masyarakat dan pimpinan saya menyatakan setelah saya tugaskan ini, perlu akselerasi PPU dengan IKN, jadi siap laksanakan," jelasnya.

Untuk diketahui, Makmur dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi kepala daerah sementara di PPU sejak 19 September 2023. Tugas tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan pasca habisnya masa kepemimpinan pasangan Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan Hamdam periode 2018-2023.

Pria kelahiran Pakkat, Sumatera Utara (Sumut), 10 September 1964 ini diketahui akan pensiun pada September 2024 mendatang. Selama itu pula, dia memastikan akan menyelesaikan segala tugas yang diberikan padanya hingga akhir masa jabatan.

"Saya nothing to lose saja bekerja. Persoalan orang bicara begitu, biarkan saja. Kita lihat saja nanti. Perahu saya ini nanti berlabuhnya di mana, kembali ke Jakarta menjalankan tugas yang baru, atau bagaimana," tutup Makmur.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha R



ROBBI/MKN

Ketua DPC PKB PPU, Irawan Heru Suryanto.

DPC PKB PPU Resmi Buka Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup Pilkada 2024

PENAJAM PASER UTARA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Penajam Paser Utara (PPU) resmi membuka penjangkaran bagi bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup), Senin (22/4/2024).

Berbagai kriteria khusus dicari dalam upaya mewujudkan pembangunan di Benua Taka yang sesuai visi kemajuan partai bergambar bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang ini.

Proses pendaftaran akan dilaksanakan mulai tanggal 22-25 April 2024, sedangkan pengembalian formulir pendaftaran akan diterima hingga tanggal 30 April 2024 mendatang.

PKB PPU memberikan jeda waktu yang cukup panjang bagi para calon untuk mengajukan diri dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

"Mulai besok, pertanggal 22 April, PKB PPU secara resmi membuka kesempatan bagi para putra-putri terbaik yang berminat mencalonkan diri sebagai pemimpin di Kabupaten Penajam Paser Utara," ungkap Ketua DPC PKB PPU, Irawan Heru Suryanto.

Peluang ini dibuka bagi siapa pun yang memiliki kesempatan dan niat kuat untuk berkontribusi dalam memimpin PPU ke arah yang lebih baik. Dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi calon-calon potensial, PKB PPU menegaskan komitmennya untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

"Kami mengajak para calon untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kami percaya bahwa kehadiran mereka akan memberikan warna baru dan energi positif bagi pembangunan daerah

ini," tambahnya.

Untuk diketahui, DPC PKB PPU sukses meraih 2 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Menduduki peringkat ke-4 dengan perolehan suara sebanyak 11.213 suara.

Oleh karena itu pihaknya masih membutuhkan tambahan kursi untuk memenuhi kuota persyaratan pencalonan. Model ini siap digunakan dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) PPU pada 27 November mendatang.

"Kami berharap agar hasil dari Pilkada nantinya akan mampu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat PPU secara menyeluruh," tutup Irawan.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha R



ROBBI/MKN

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat diwawancarai usai kegiatan buka puasa bersama insan pers PPU, Senin (8/4/2024) lalu.

Digadang Maju Pilkada 2024, Makmur Marbun: Saya Ikut Arah Angin

PENAJAM PASER UTARA - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengungkapkan akan mengikuti instruksi Presiden RI sebagai pimpinannya dalam menjalankan tugas. Termasuk dalam menentukan arah dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dengan menjabat sebagai Direktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Makmur dipercayai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi kepala daerah sementara di PPU sejak 19 September 2023. Tugas tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan pasca habisnya masa kepemimpinan pasangan Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan Hamdam periode 2018-2023.

Makmur belakangan digadang-gadang layak menjadi Calon Bupati PPU oleh berbagai pihak. Pasalnya, apa yang telah dilakukan untuk daerah berjuluk Benuo Taka ini dinilai membawa kemajuan untuk masyarakat.

Saat ditanya Media Kaltim beberapa waktu lalu mengenai minatnya untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada PPU 2024, Makmur menjawab akan menunggu arahan Presiden terlebih dahulu. Karena menurutnya, sebagai Aparatur Sipil Negara

(ASN) tentunya perlu untuk mengikuti setiap instruksi yang diberikan padanya dalam menjalankan tugas.

"Sayang arah dari pimpinan dulu, Pak Presiden. Kan yang menugaskan saya ke sini (PPU) kan beliau. Nanti saya tanya, Pak setelah ini saya mau bapak kemanain? Kamu balik kandang, atau ke Solo aja, ngurusin delman. Ya saya nurut saja," ujarnya.

Adanya dorongan untuk berlaga menjadi kepala daerah definitif ini, dirinya juga mengakui telah mendengar secara langsung dari masyarakat yang ditemuinya. Meski begitu, Makmur menyampaikan bahwa dirinya akan tetap fokus pada pekerjaan yang saat ini masih diamanahkan padanya hingga selesai.

"Malah mereka (masyarakat) yang ngomong, saya malah nangis sendiri. Saya sampai bingung. Ya, biarkanlah masyarakat yang menilai apa yang saya kerjakan. Tapi tidak maunya saya, maunya masyarakat seperti apa? Nanti kita lihat. Yang penting saya bekerja untuk masyarakat, dan saya fokus di situ," tegasnya.

"Persoalannya nanti bulan berapa, bagaimana arahnya, saya juga tidak tahu mau ke sini (PPU). Saya ikuti saja arah angin mau ke mana, disuruh ke mana," sambung Makmur.

Makmur bahkan mengungkapkan permintaan terhadap dirinya untuk menjadi kepala daerah diakui juga datang dari kampung halamannya, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada momentum Paskah akhir Maret 2024 lalu. Dukungan tersebut didapat saat dirinya berziarah ke makam orang tuanya di Desa Parbotihan, Kecamatan Onan Ganjang. "Di kampung saya juga. Saya digadang-gadang menjadi calon bupati. Semuanya bertanya, waktu saya pulang kampung untuk ziarah. Saya sampai takut, makanya saya cepat pulang. Saya takut keseleo ngomongnya, karena animo masyarakat meminta itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Pakkat, Sumatera Utara (Sumut), 10 September 1964 ini diketahui akan pensiun pada September 2024 mendatang. Selama itu pula, dia memastikan akan menyelesaikan segala tugas yang diberikan padanya hingga akhir masa jabatan.

"Saya nothing to lose saja bekerja. Persoalan orang bicara begitu, biarkan saja. Kita lihat saja nanti. Perahu saya ini nanti berlabuhnya di mana, kembali ke Jakarta menjalankan tugas yang baru, atau bagaimana," tutup Makmur.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha R

Mustaqim: Kontestasi Politik Butuh Uang Banyak

PPU - Mantan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dua periode dari 2008 hingga 2018, Mustaqim bisa dikatakan termasuk salah satu calon potensial jika melaju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namun, dirinya memastikan tidak akan mencalonkan kembali. Karena menurutnya, kontestasi politik sangat membutuhkan uang yang banyak.

Mustaqim mengatakan dirinya tidak ingin melaju di Pilkada tahun ini, mengingat dirinya yang tidak memiliki uang untuk melaju kembali. Ia menyatakan bahwa jika ingin berhasil menjadi calon legislatif ataupun kepala daerah harus menggunakan kekuatan modal yang juga cukup.

"Jujur saja, saya ini tidak punya uang. Enggak gratis. Ya kalau keinginan pasti semua orang ingin," jelasnya Senin (22/04/2024).

Dikatakan, meskipun menggunakan dukungan partai politik sekalipun juga harus memiliki modal yang cukup. Bahkan, secara track record bahwa dirinya telah memimpin dua periode pun tidak menjamin dirinya dapat berhasil memenangkan kontestasi tersebut.

"Saya juga sudah mencalonkan legislatif sebelumnya. Ya karena enggak pakai uang, ya enggak lolos juga. Berbeda dengan dahulu, saya melaju di dua periode itu ya enggak pakai uang," tambahnya.

Bahkan Mustaqim menyayangkan perubahan situasi politik sudah sangat berubah dari sebelumnya. Ia menceritakan saat pertama kali mencalonkan diri sebagai wakil bupati periode 2008-2013, warga PPU sangat anti dengan politik uang.

"Dulu itu waktu saya sosialisasi ke Kelurahan Maridan bahkan ada spanduk mereka menolak politik uang, sekarang sangat berbeda," terangnya.

Pria kelahiran 1949 ini menyadari bahwa strata pendidikan juga sangat berpengaruh pada kualitas berpolitiknya. Ia mengatakan sangat merindukan masa-masa saat dirinya mencalonkan sebagai wakil bupati, bahkan saat melakukan sosialisasi masa itu, dirinya sangat ditunggu.

"Saya merindukan lagi masa itu, kayaknya tidak ada lagi, hanya segelintir saja," tambahnya.

Mustaqim juga menegaskan

jika dirinya diminta untuk kembali berkontestasi, dirinya akan menegakkan terkait dengan permodalan ini. Dikarenakan menurutnya, percuma bicara visi dan misi jika pada hari pemilihan diberi serangan fajar semua dapat berubah drastis.

"Saya berani bertaruh, jika pun Rektor Unmul (Universitas Mulawarman) yang mencalonkan diri, jika tidak punya uang maka tidak akan menang," tegasnya.

Ia juga mengatakan dibanding dengan periode sebelumnya, periode kali ini tidak ada yang melakukan komunikasi kepada dirinya untuk berkontestasi bersama. Ia berharap siapa pun yang terpilih nanti bukan hanya dinilai karena uangnya saja, seolah orang baik hanya diukur dari berapa uangnya.

"Peluang korupsi pasca telah menjadi bupati itu banyak, tapi jangan sampai semuanya menjadi tidak baik karena hanya berfokus pada praktik politik uang dan akhirnya berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," pungkasnya.

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
J. Bigler Karasas No. 118A, Sebelah Gas, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000 member of ASTRA

Disporapar Akui Masih Banyak “PR” Soal Potensi Ekraf di Samarinda

SAMARINDA - Ekonomi Kreatif (ekraf) digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di masa yang akan datang oleh Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi sempat berjanji untuk memberikan dukungan penuh terhadap badan ekonomi kreatif agar mampu memberikan dampak nyata dalam perekonomian Indonesia.

Di Samarinda sendiri, baru-baru ini Pansus II DPRD Samarinda membahas tentang rancangan peraturan daerah mengenai ekonomi kreatif. Hal itu bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Samarinda. Kemudian Media Kaltim coba untuk menanyakan mengenai perkembangan ekonomi kreatif kepada Disporapar Samarinda.

Saat ditemui di kantor Disporapar, Jln. Dahlia, Samarinda, pada Senin (22/4/2024), Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Agnes Gering Belawing, menerangkan bahwasanya dukungan ekonomi kreatif di Samarinda sempat terhambat karena tiadanya dasar hukum daerah yang bisa menjadi patokan arah ekonomi kreatif. Itu menjadi PR, sebab pelaku ekonomi kreatif di Samarinda sudah banyak namun belum ada hukum daerah yang menaungi.

“Pelaku (Ekonomi Kreatif) itu kita sudah ada, tapi secara hukum pengembangan dari pemerintah daerahnya belum ada. Itu menjadi tugas kami untuk mengumpulkan data hukumnya dulu, baru kita ke Bapedda, itulah yang menjadi PR kami,” terangnya.

Setidaknya ada 17 sub sektor dari ekonomi kreatif, di antaranya ialah pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan hingga aplikasi. Dari 17 itu, Agnes menuturkan Samarinda memiliki setiap sub sektornya.

Di tahun 2023, matrik tentang ekonomi kreatif kemudian ditetapkan lantas kegiatannya mulai dilaksanakan. Setidaknya ada dua kegiatan, yang pertama mengenai revitalisasi ruang ekonomi kreatif dan yang kedua ekosistem ekonomi kreatif. Untuk membangun ekosistemnya, maka itu meliputi produksi, SDM, pendidikan hingga pelatihan.

Agnes juga menyebutkan bahwa data pelaku ekonomi kreatif di Samarinda yang ada di Borang (Aplikasi Resmi Kemenparekraf) ada sebanyak 375 orang yang terbagi menjadi 17 subsektor ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, Samarinda dinilai memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Dari penuturan Agnes setidaknya ada beberapa sektor yaitu kuliner, fashion, musik, fotografi, seni pertunjukan hingga kriya. Sektor tersebut diharapkan mampu berdampak kepada sektor lain dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Samarinda.

Hanya saja, dari penjelasan Nur, salah satu anggota pengembangan ekonomi kreatif, Samarinda masih belum ditetapkan keunggulannya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif (Kemenparekraf). Tahun lalu, sudah ada rencana pelaksanaan pertemuan, akan tetapi itu tertunda dikarenakan oleh beberapa kendala yang ada, salah satunya adalah anggaran. Sehingga

hingga saat ini Samarinda belum ditentukan sebagai kota kreatif berbeda dengan Balikpapan atau Tenggara yang sudah lebih dulu.

“Tahun kemarin kami sudah dijanjikan, tapi ternyata batal datang karena ada satu dan lain hal,” sahutnya.

Di tahun ini, pengembangan ekonomi kreatif Samarinda telah mendapatkan anggaran sendiri untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Dengan begitu, pengembangan ekonomi kreatif di Samarinda dapat dilaksanakan, salah satunya akan diselenggarakan Mahakam Fashion Festival di bulan Juni nanti dengan mengangkat tema kain ulap doyo. Harapannya kegiatan tersebut akan melibatkan banyak sektor ekonomi kreatif lainnya juga menjadi upaya pemasaran.

Terlepas dari pada itu, Agnes mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan kota lainnya dalam mendukung ekonomi kreatif di Samarinda. Ia beranggapan Samarinda yang luas kotanya tidak begitu besar perlu melakukan kolaborasi dalam menjual produk-produk ekonomi kreatif.

“Ini memang susah, tapi bisa. Karena kalau kita tidak kolaborasi Samarinda kan punya wilayah yang kecil dan hutannya juga sudah habis jadi memang kita perlu menekankan kolaborasi,” pangkasnya.

Agnes mengakui Samarinda secara ekonomi kreatif sangat jauh ketinggalan dengan kota-kota lain dalam penempatannya. Maka pengembangan ekonomi kreatif masih menunggu penetapan dari Kemenparekraf. Namun Agnes optimis kalau Samarinda dapat menyusul kota-kota lain di Kalimantan Timur. Itu dikarenakan pelaku ekonomi kreatif di Samarinda sangatlah banyak dan unggul.

Di akhir, Agnes melihat sektor kriya dari pendaurulangan barang bekas akan menjadi fokus ke depannya di Samarinda. Selain karena anjuran dari Wali Kota Samarinda, ia merasa hal itu perlu dilakukan saat sampah di Samarinda semakin menumpuk. Bagaimanapun ekonomi kreatif bisa jadi salah satu alternatif ekonomi daerah seperti yang digaungkan oleh Presiden Jokowi.

Pewarta : Khoirul Umam

Editor : Nicha R



KHOIRUL UMAM/MEDIAKALTIM

Agnes beserta jajaran Pengembang Ekonomi Kreatif saat ditemui di Disporapar Samarinda.



Grand Mutiara Hotel



Phone : 0548 - 41988
+ 0822 5313 7359 (WA)

IG : @grandmutiarahotelbtg
Email : grandmutiarabontang@gmail.com

Jl. Arief Rahman Hakim Km3
Kel. Belimbing
Bontang - Kaltim